



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009

Lampiran : 2 (dua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150 ayat (3) huruf d;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Papua Tahun 2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
- (2) RKPD Provinsi Papua Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Buku I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Buku II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Papua Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2009, antara lain termasuk di dalamnya kondisi ekonomi tahun 2007 dan perkiraan 2009, lingkungan eksternal dan internal tahun 2009, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Provinsi Papua Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Badan/Dinas/Biro dan Kantor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2009;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3...../3

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2009 :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Papua menggunakan RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua;
- b. Badan/Dinas/Biro dan Kantor menggunakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan/Dinas/Biro dan Kantor dengan DPRP Provinsi Papua.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari : Badan/Dinas/Biro dan Kantor, membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Papua dan Kepala BAPPEDA Provinsi Papua paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA Provinsi Papua menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2009 dengan RKPD Provinsi Papua Tahun 2009.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 31 Maret 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 1 April Tahun 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, M.M
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2009 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.K.H ROEMBIAK

BAB I PENDAHULUAN

Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua dan merupakan kelanjutan RKPD tahun 2008. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Tahun Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD tahun 2009 di susun sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2009.

Di dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011 telah ditetapkan 4 (empat) agenda Pembangunan yaitu :

1. Agenda Menata Kembali Pemerintahan Daerah;
2. Agenda Membangun Tanah Papua Yang Damai Dan Sejahtera;
3. Agenda Membangun Tanah Papua Yang Aman Dan Damai
4. Agenda Meningkatkan Dan Mempercepat Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Keempat agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan pilar pokok untuk mencapai visi pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKPD. RKPD tahun 2009 berisi kebijakan pembangunan, baik yang terkait dengan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, perkembangan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2009 di susun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang berada di kampung-kampung.
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang lebih luas dimaksudkan adalah tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan masyarakat Papua agar dapat mengatur sumberdaya dan kekayaan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat Papua. Kewenangan yang luas yang diperoleh ini merupakan tantangan yang besar dan perlu dijawab melalui berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang mampu mencirikan kekhususan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, serta program-program SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah dan layanan umum

Dengan demikian RKPD Provinsi Papua Tahun 2009 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Provinsi Papua dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

1. SKPD Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
2. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD kabupaten/Kota;
3. Menyusun RAPBD Provinsi Papua Tahun 2009.

Selain itu penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar fungsi dan sub fungsi pembangunan, antar urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.

BAB II

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

2.1. KINERJA PEMBANGUNAN

Kinerja pembangunan atau pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan akhir tahun 2007 merupakan agregasi keberhasilan di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian tanggungjawab kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, menjadi kewajiban bersama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Selanjutnya untuk mengukur kemajuan pembangunan daerah diperlukan pula indikator yang mampu menggambarkan kemajuan masing-masing daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Khusus. Secara umum Pencapaian pembangunan daerah dapat dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah meliputi:

a. Pelaksanaan Otonomi Khusus secara Murni dan Konsekuen

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 telah menciptakan kesempatan dan peluang yang luas untuk melakukan perubahan ke arah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kini, Undang-undang ini telah menjadi acuan utama paradigma baru pembangunan di Tanah Papua, yang tidak saja bermaksud menegaskan kembali hak-hak dasar penduduk Asli Papua, tetapi lebih dari itu merupakan suatu alternatif solusi terbaik sebagai jawaban dalam rangka meredam keinginan disintegrasi. Hakiki dari undang-undang tersebut adalah merupakan suatu instrumen hukum yang mendasari seluruh kebijakan pembangunan di Tanah ini guna menghantarkan penduduk asli Papua mene-mukan harapannya, mencapai kesejahteraan yang mandiri dan bermartabat

Wujud nyata dari implementasi Otonomi khusus diindikasikan oleh keberhasilan menata sistem pemerintahan dan melaksanakan program pembangunan di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21/2001, yang memiliki dampak positif dan signifikan bagi kemajuan Penduduk Asli Papua hingga ke wilayah terpencil. Karena itu, semua program pemerintahan dan pembangunan dalam era Otsus Papua dijalankan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 21/2001 secara konsekuen dan konsisten.

b. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Daerah

Komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) melalui Reformasi birokrasi, Reformasi Keuangan, secara nyata telah membawa perubahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya peningkatan pelayanan publik.

Program Reformasi Birokrasi telah diwujudkannyatakan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) bagi para calon pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Selain itu semakin meningkatnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk Reformasi Keuangan telah diwujudkannyatakan melalui dua program utama yaitu penataan seluruh sistem administrasi keuangan melalui pengembangan SIM (sistem informasi dan manajemen) Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, monitoring, audit, dan akuntabilitas, serta meletakkan dasar untuk membangun sistem pengadaan barang dan jasa secara independen. Khusus untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008, alokasi anggaran dilakukan berdasarkan bentuk

piramidal...../

piramidal yang berarti seluruh program dan kegiatan pembangunan telah diarahkan sebesar-besarnya untuk mengangkat masyarakat yang ada di kampung dari kemiskinan, kebodohan dan keterisolasian. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk harus diperhatikan adalah bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga perencanaan pembangunan yang akan dihasilkan dapat dilaksanakan secara maksimal, efektif, efisien dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia adalah proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Konsep indeks pembangunan manusia adalah mengukur pencapaian keseluruhan suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 dimensi yaitu : angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan paritas daya beli. Dari segi kualitas manusia, di Provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2005 IPM Papua 62,1 meningkat menjadi 62,8 di tahun 2006. Namun perkembangan IPM Provinsi Papua masih berada pada posisi paling rendah di Indonesia atau di bawah IPM Papua Barat yaitu sebesar 66,1 hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan, kesehatan dan perekonomian menjadi perhatian yang serius di tahun 2009 nanti dalam pembangunan manusia.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2006

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Pengeluaran riil/kapita Disesuaikan (Rp.000)	IPM
1	Merauke	61,9	7,0	87,1	587,3	62,5
2	Jayawijaya	65,7	2,8	47,2	583,7	52,4
3	Jayapura	66,6	8,0	93,6	605,6	68,8
4	Nabire	66,7	6,1	83,2	606,9	65,2
5	Yapen waropen	66,0	6,5	86,6	621,7	67,0
6	Biak Numfor	65,4	8,0	96,6	586,1	67,3
7	Paniai	66,5	6,2	62,9	578,7	58,5
8	Puncak Jaya	66,6	6,1	86,8	620,7	67,0
9	Mimika	68,9	6,7	86,9	599,8	67,1
10	Boven Digoel	65,8	3,0	31,7	572,8	48,3
11	Mappi	65,4	2,8	31,3	573,9	48,0
12	Asmat	65,0	3,7	31,0	573,1	48,3
13	Yahukimo	65,7	2,4	31,8	574,1	48,0
14	Pegunungan Bintang	64,9	2,2	31,6	573,1	47,2
15	Tolikara	65,5	2,4	32,0	596,6	49,6
16	Sarmi	66,0	6,4	87,1	597,6	65,2
17	Keerom	66,4	7,3	91,1	597,3	66,9
18	Waropen	64,2	6,2	76,5	596,7	61,6
19	Supiori	65,0	7,7	94,1	585,8	66,2
20	Kota Jayapura	68,0	10,7	97,9	614,0	73,1

Sumber : BPS, Provinsi Papua

d. Indeks Pendidikan

Komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Kebijakan perluasan akses dan pemerataan pendidikan di semua wilayah dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan lebih banyak ditekankan pada Peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan buku-buku dan keringanan biaya pendidikan agar anak didik dapat dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Secara nyata telah dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni Tahun 2005 pada SD/MI mencapai 87,54 persen, pada SMP/MTs mencapai 47,28 persen, pada SMU mencapai 27,25 persen. Pada tahun 2006 pada SD/MI mencapai 89,35 persen, pada SMP/MTs mencapai 50,51 persen, pada SMU mencapai 30,23 persen. Lama sekolah rata-rata pada tahun 2004 mencapai 6,1, tahun 2005 meningkat mencapai 6,2. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi semakin besar. Begitu pula dengan Angka Melek Huruf pada tahun 2004 mencapai 74,2 persen, tahun 2005 meningkat mencapai 74,9 persen, tahun 2006 meningkat mencapai 75,4 persen dan diharapkan capaian untuk tahun 2008 mencapai sekitar 80 persen, di samping itu dilaksanakan pula pendidikan anak dini usia untuk lebih mempersiapkan peserta didik memasuki pendidikan di sekolah.

e. Indeks Kesehatan

Untuk mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat pada periode waktu tertentu, yang diukur melalui Angka Harapan Hidup waktu lahir. Gambaran kinerja pembangunan kesehatan dalam meningkatkan harapan hidup masyarakat mencapai 67,6 tahun (sumber : BPS, 2007). Adapun kondisi kesehatan yang diperoleh dari pembangunan kesehatan antara lain:

1. Angka kematian Ibu melahirkan 396/100.000 KLH;
2. Angka Kematian Bayi 56/1000 KLH;
3. Angka Penyakit menular ISPA 3,46%, malaria 76,5/1000 Pddk, CFR Diare lebih dari 1%, angka kebutuhan TBC mencapai 65%, penderita HIV-AIDS mendapat ARV mencapai 10%;
4. Angka presentasi gizi kurang dan buruk pada anak balita 18%;
5. Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan 42%;
6. Peningkatan cakupan pelayanan/pemberian Vitamin A bagi bayi menjadi 90 persen pada tahun 2006, sedangkan bagi balita yang menerima Vitamin A meningkat menjadi persen pada tahun 2006;
7. Jumlah PUSKESMAS sebanyak 232 buah dan PUSKESMAS Pembantu 589 buah serta Puskesmas keliling 373 buah. Beberapa Puskesmas telah meningkatkan pelayanannya menjadi Rumah Sakit, sehingga jumlah Rumah Sakit Pemerintah menjadi 22 buah.
8. Adapun jumlah dokter dan paramedis yang tersebar di semua fasilitas kesehatan di atas adalah dokter sebanyak 280 orang, perawat sebanyak 2.865 orang dan non-perawat sebanyak 375 orang.

f. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada kurun waktu 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,08 Persen dan pada kurun waktu 2000-2004 menurun sebesar 2,75 Persen. Terjadinya penurunan angka pertumbuhan penduduk antara lain diakibatkan angka kelahiran menurun yang dipengaruhi oleh kesadaran tentang pentingnya pengaturan jumlah kelahiran dan menurunnya jumlah migrasi masuk ke Provinsi Papua. Penurunan tersebut diimbangi pula dengan adanya perubahan di segi kualitas manusia yang semakin meningkat yang ditinjau dari sudut pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor alami (kelahiran dan kematian) dan migrasi masuk daerah. Dengan pertumbuhan penduduk tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk Papua pada Tahun 2004 setelah dikurangi luas wilayah (316.408 km²) dan jumlah penduduk IJB maka kepadatan penduduk di Provinsi Papua sebesar 5,22 jiwa per Km².

g. Penduduk Miskin...../5

g. Penduduk Miskin

Pada periode 2006-2007 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 23,3 ribu dari 816,7 ribu pada tahun 2006 menjadi 793,4 ribu pada tahun 2007. secara relatif juga mengalami penurunan penduduk miskin dari 41,52 persen pada tahun 2006 menjadi 40,78 persen pada periode tahun 2007.

Namun terjadi peningkatan persentase penduduk miskin selama 2004-2007 karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik cukup tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 26,18 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Tabel 2.2

Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Papua Menurut Daerah 2004-2007

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Kampung	Jumlah	Kota	Kampung	Jumlah
2004	49,1	917,7	966,8	7,71	49,28	38,69
2005	53,0	975,2	1.028,2	9,23	50,16	40,83
2006	39,4	777,3	816,7	8,71	51,31	41,52
2007	35,4	758,0	793,4	7,97	50,47	40,78

Sumber : BPS, Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Papua 2007

*) Mulai tahun 2006 tidak termasuk Provinsi Papua Barat

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Tinggi rendahnya tingkat pengangguran terbuka memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas daerah. Pada tahun 2007 menggambarkan bahwa penduduk Provinsi Papua yang berusia 15 tahun keatas atau Penduduk Usia Kerja (PUK) tercatat sebesar 1.3 juta jiwa, jumlah tersebut meningkat sekitar 6,45 persen bila dibandingkan pada tahun 2006. Pertumbuhan angkata kerja ini diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang bekerja tetapi belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang baru sehingga trend pengangguran menagalami pertumbuhan sebesar 29,46 persen pada tahun 2007.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada february 2007 sebesar 5,52 persen, meningkat 1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat dari lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.

Sebagai konsekuensi rendahnya kualitas SDM, struktur ketenagakerjaan di Provinsi Papua masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2007 sektor pertanian menyerap tenaga kerja tertinggi sebesar 77,05 persen dari total pekerja, di sektor jasa 10,40 persen, disektor perdagangan 5,67 persen dan sisanya tersebar diberbagai sektor.

i. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi papua mengalami pertumbuhan positif di seluruh lapangan usaha/sector. Jika ditinjau dari sisi pangasanya, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sector yang memiliki pangsa terbesar sementara sector listrik, gas dan air memiliki pangsa terendah. Laju pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2007 sebesar 11,1 persen dengan didukung pertumbuhan positif pada semua sector kecuali sector pertambangan yang berfluktuasi.

j. Produk...../6

j. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Papua yang menggambarkan produksi barang dan jasa masyarakat Provinsi Papua, pada Periode Tahun 2006 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 18.39 trilyun atau menurun sebesar -17,20 persen dibanding PDRB tahun 2005 sebesar Rp. 22,21 trilyun, penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai konsentrat tembaga.

Tabel 2.3

PDRB Provinsi Papua atas Harga Berlaku dan Harga Konstan (Juta Rupiah)

Tahun	Termasuk Tambang		Tanpa Tambang	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2004	24,842,903.74	16,282,967.57	10,649,592.55	7,484,843.80
2005	43,615,319.20	22,209,192.69	12,481,372.66	7,940,695.20
2006	46,692,056.58	18,388,879.26	14,784,529.11	8,632,693.20

Sumber : PDRB Provinsi Papua 2006

k. Jumlah Investasi

Papua berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB selama periode tahun 2004-2005 Mengalami pertumbuhan. Kegiatan investasi di Papua pada tahun 2004 tumbuh sebesar 7,03 persen meningkat sebesar 2,46 persen bila dibanding pada tahun 2000 sebesar 4,57 persen dan selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan investasi di tanah Papua. Meningkatnya kegiatan investasi memberikan harapan positif bagi kemajuan ekonomi ke depan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi tersebut terkait dengan pembukaan usaha baru maupun pengembangan usaha untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat ataupun untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja meskipun masih adanya kecenderungan berfluktuasi, pada beberapa tahun terakhir investasi di Papua senantiasa tumbuh positif.

Jumlah proyek PMDN di Provinsi Papua terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebanyak 36 proyek dengan realisasi investasi sebesar Rp. 3,1 trilyun, naik sebesar 63,16 persen bila dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu dengan realisasi investasi Rp. 1,9 trilyun meliputi 33 proyek.

Sedangkan jumlah proyek PMA sampai dengan tahun 2005 mencapai 46 proyek dengan realisasi investasi sebesar US\$ 6,57 juta, mengalami peningkatan sebesar 0,88 persen, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2004 yaitu sebesar US\$ 6,52 juta.

l. Ketentraman, ketertiban, hukum dan HAM

Keberhasilan pembangunan dalam pencapaian pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat salah satunya dapat dilihat dari besaran indeks kejahatan/kriminalitas. Jika pada Tahun 2003 yang dijadikan dasar perhitungan bahwa ada kecenderungan angka indeks kriminalitas yang terus menurun pada tahun 2004 dan tahun 2005 di Bidang Hukum, kondisi penegakan hukum di Papua sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Produk hukum seperti Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi yang merupakan implementasi dari Otonomi Khusus ditingkatkan agar dapat mencerminkan aspirasi kebutuhan orang asli Papua, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Situasi kemandirian dan ketertiban yang cukup baik dalam tahun 2004, diharapkan semakin membaik dalam akhir tahun 2005. Angka kriminalitas, penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba), dan tindakan kekerasan terhadap perempuan diharapkan dapat menurun. Demikian pula dibidang hukum pada akhir tahun 2005 diharapkan kondisi penegakan hukum di Provinsi Papua sudah semakin baik. Demikian pula Peraturan daerah Khusus dan Peraturan Daerah provinsi juga lebih aspiratif dan mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat Papua.

2.2 MASALAH DAN TANTANGAN POKOK PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Dari evaluasi terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang pembangunan, telah diintrodusir berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu rumusan permasalahan pokok Papua yang diintroduksi dari permasalahan-permasalahan berbagai sektor pembangunan pada bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan tanah Papua mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan telah banyak membawa perubahan terhadap wilayah dan penduduknya. Namun dari aspek pemerataan terlihat bahwa pembangunan masih lebih banyak terpusat di kota dan dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan masyarakat di kampung sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.

Kemampuan masyarakat dikampung untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar masih terbatas seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta transportasi masih terbatas. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat paling bawah. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung.

Kondisi kemiskinan akan memperparah terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar perkotaan dengan distrik dan kampung terutama diwilayah atau daerah pegunungan dan pedalaman. Kondisi kemiskinan ini disebabkan karena isolasi wilayah dan kesenjangan antar wilayah, rendahnya kualitas SDM, rendahnya pendapatan masyarakat karena terbatasnya lapangan kerja dan tidak adanya akses pasar yang memadai, serta terbatasnya investasi yang dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk baik di kampung, distrik maupun diperkotaan.

Kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan masih bertumpu pada pertumbuhan semata tanpa memperhatikan pemerataan. Secara jelas permasalahan kemiskinan dan kesenjangan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Masih tingginya perkembangan jumlah penduduk miskin;
- b) Tingginya ketimpangan dan tingkat kesenjangan antar wilayah serta antar perkotaan, distrik dan kampung;
- c) Masih adanya wilayah yang rentan dari bencana kelaparan;
- d) Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
- e) Belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat kampung.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan di fokuskan pada: Pertama, perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha. Kedua, upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sehingga perlu perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang pro-poor, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kaitan itu, untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan pada tahun 2009 dititikberatkan pada upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, alokasi dana otsus yang menjangkau, menyentuh dan membangun semua kampung dan kelompok masyarakat miskin, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kampung dan mengoptimalkan peran kemitraan tiga tungku (agama, adat dan pemerintah) dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan/kampung. Serta mengembangkan peran Perempuan melalui upaya-upaya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

2. Belum...../8

2. Belum optimalnya Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 telah menciptakan kesempatan dan peluang yang luas untuk melakukan perubahan ke arah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun pelaksanaan dari apa yang terkandung dalam UU Otsus belum terejawantahkan dalam pembangunan masih terdapat beragam kendala serius dalam implementasinya. Paradigma pembangunan yang diafiliasikan telah mengalami *distorsi* yang berkepanjangan. Keberpihakan kepada Penduduk Asli Papua masih pada tataran wacana yang seringkali disuarakan oleh para elite dimana Penduduk Asli Papua belum dapat direalisasikan secara optimal. Padahal, keberpihakan pada konteks ini merupakan suatu konsekwensi logis dari proses reformasi yang menandai munculnya kesadaran politik terhadap hak-hak dasar Penduduk Asli Papua. Secara konkrit masalah yang harus dipecahkan pada tahun 2009 adalah :

- a) Belum adanya persamaan persepsi tentang pelaksanaan otonomi Khusus antara pusat dan daerah, dan antar daerah itu sendiri;
- b) Belum selesainya Penyusunan Perdasus dan Perdasi sebagai implementasi pelaksanaan Otonomi Khusus;
- c) Pemekaran Provinsi dan Kabupaten yang tidak sesuai dengan UU 21 tahun 2001.

3. Rendahnya Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan pendidikan dan kesehatan, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan relatif belum memadai, dan ini sangat dominan. Secara rinci dapat diklasifikasikan masalah dalam pendidikan dan kesehatan yaitu :

• Aksesibilitas Pendidikan

- a) Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi.
- b) Belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga kependidikan.
- c) Kurangnya jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- d) Belum mantapnya sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
- e) Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah.
- f) Belum mantapnya penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- g) Belum optimalnya kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
- h) Belum terselenggarakannya secara memadai pengembangan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh.
- i) Belum optimalnya keterpaduan program pembangunan bidang pendidikan dengan bidang lain.

• Aksesibilitas Kesehatan

- a) Mutu, ketersediaan, dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil
- b) Angka kesakitan yang masih tinggi terutama karena penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria, diare dan infeksi saluran pernafasan, yang diperburuk dengan munculnya penyakit baru seperti flu burung yang berpotensi menjadi pandemi;

c) Masih...../9

- c) Masih tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya;
- d) Belum optimalnya dukungan pelayanan kesehatan di bidang obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan; serta
- e) Perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan.

4. Rendahnya Tingkat Kemajuan Ekonomi Daerah.

Perekonomian Papua pada tahun 2006 menunjukkan peningkatan namun perkembangannya masih lambat. Melalui berbagai program yang dilaksanakan belum mampu memberikan hasil yang cukup baik. Permasalahan di atas juga ditandai oleh belum Bergeraknya investasi sehingga masih lemahnya produksi barang yang berkualitas ekspor, semakin meningkatnya angka pengangguran, semakin sempitnya lapangan kerja di daerah, masih lemahnya unit usaha dan lembaga ekonomi dalam mengembangkan produksinya, semakin melemahnya daya saing pengusaha dalam pasar bebas yang disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah. Oleh karena itu tantangan pembangunan untuk Tahun 2009 adalah :

- Mengembangkan Komoditas yang Berorientasi Pasar;
- Peningkatan secara cepat investasi dan daya saing ekspor;
- Mengembangkan Perusahaan Daerah;
- Pengelolaan SDA energi yang terbarukan.

5. Minimnya sarana prasarana Infrastruktur.

Masih tingginya ketimpangan wilayah di Papua antara kawasan pegunungan dan kawasan pesisir, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana infrastruktur. Pembangunan jaringan transportasi terpadu yang dapat membuka akses untuk menerobos isolasi wilayah, maupun membuka akses keluar untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, permukiman penduduk dan perdagangan di dalam maupun di luar negeri masih sebatas transportasi melalui udara.

Diharapkan terbangunnya sarana prasarana infrastruktur akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, secara otomatis telah mendorong terbukanya daerah-daerah terisolasi dan membuka wilayah-wilayah distrik dan kampung. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara tidak langsung juga telah mengakibatkan terbukanya akses secara kewilayahan di Provinsi Papua. Selain itu Pengembangan jaringan Transportasi mendukung pembangunan kawasan tumbuh cepat yang memiliki SDA yang sangat besar seperti Membramo untuk Pantai Utara Papua dan pantai Selatan Papua dimulai dari Kawasan Mimika sampai dengan Merauke.

6. Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Energi.

Pengembangan energi di Provinsi Papua dihadapkan pada masalah kebutuhannya yang terus meningkat, saat ini telah terjadi pemadaman secara bergilir, sehingga semakin menyebabkan menurunnya produktivitas dunia usaha utamanya kalangan mikro, kecil dan menengah.

7. Rendahnya Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Issue strategis yang saat ini memerlukan perhatian serius adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan sebagai akibat kerusakan sumberdaya hutan, maka menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat besar dengan terjadinya banjir dan tanah longsor.

8. Belum optimalnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban.

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat kepada hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan sosial yang tertib, teratur dan berdisiplin. Selain dimensi positifnya, reformasi telah memberikan pengalaman indikatif yang bersifat negatif. Dalam banyak kasus, hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di masyarakat seringkali tidak lagi terpolakan dalam kerangka tertib hukum formal dan hukum adat. Terjadi banyak pelanggaran hukum yang tidak saja disebabkan oleh : *Pertama*, ketidaktahuan sebagian masyarakat. Dewasa ini terdapat banyak versi produk-produk hukum yang belum tersosialisasikan kepada masyarakat, karena versinya selalu berubah dan tak jarang saling bertentangan, inkonsistensi dan saling tumpang tindih satu sama lain; *Kedua*, ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap norma-norma hukum sebagai wujud dari kekecewaan atas produk-produk hukum yang isinya tidak konsisten. Kondisi tersebut telah berimplikasi pada timbulnya degradasi moral hukum, longgarnya disiplin, dan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Terkait dengan hal ini, peranan lembaga-lembaga peradilan yang sudah ada perlu ditingkatkan terus ke arah terciptanya sistem peradilan yang transparan dan terbuka, berkeadilan, tidak diskriminatif dan tegas.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah ketentraman, ketertiban dan HAM dengan masyarakat Papua, dikenal bersifat multi-kultural yang sangat kaya dengan nilai-nilai adat dan budaya, terdiri dari berbagai etnis yang datang dari berbagai pulau di Indonesia dengan corak kebudayaan dan adat-istiadatnya masing-masing. Tidak kurang dari 300an etnis asli dan non asli Papua, hidup dan eksis bersama-sama yang mencirikan kemajemukan, keanekaragaman, mengagungkan perbedaan dan kesederajatan. Menjadikan Papua memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal serta adanya terorisme. Maraknya kasus pelanggaran HAM adalah cermin eksese-ekes yang terjadi akibat dari suatu kebijakan pembangunan yang hanya bersifat parsial, tidak menyeluruh, dan cenderung kuat bersifat eksklusif. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, melainkan harus ada perubahan orientasi pembangunan yang dapat menghantarkan kepada suatu kondisi kehidupan sosial yang berkesetaraan. Upaya berkesinambungan untuk mencapai tata kehidupan yang sederajat dan saling menghargai, memerlukan kearifan perlakuan.

9. Pembangunan di wilayah perbatasan

Wilayah provinsi Papua yang berbatasan secara langsung dengan negara PNG serta dampak pembangunan yang melahirkan marginalisasi masyarakat, disparitas antar wilayah, kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab pemicu maraknya kejahatan transnasional. Apalagi jika kondisi diperburuk oleh masih rendahnya nilai-nilai kejuangan dan wawasan kebangsaan. Hal seperti ini menjadi pendorong tingginya mobilitas penduduk secara ilegal (pelintas batas tradisional) ke negara tetangga, baik melalui darat maupun laut, serta maraknya pencurian kekayaan alam Papua (hutan, tambang, laut). Adapun masalah pembangunan perbatasan adalah :

- a) Belum optimalnya pelayanan dari pemerintah baik untuk wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan negara;
- b) Belum optimalnya koordinasi pembangunan dalam mensinergikan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan;
- c) Masih dominannya pendekatan keamanan (security approach) dibandingkan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Pembangunan daerah Tahun 2009, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2009 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.3.1 Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009

Untuk mensinergikan pembangunan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2009.

Prioritas pembangunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009 adalah :

1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan;
2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi;
3. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pementapan demokrasi dan keamanan dalam negeri.

2.3.2 Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009

Selanjutnya dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 dan memperhatikan target kinerja agregat tahun 2009 serta mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua 2006-2011, dalam rangka perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta sekaligus dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, maka prioritas agenda pembangunan RKPD Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, melalui menurunkan persentase penduduk miskin, meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar, menurunnya angka pengangguran serta peningkatan pelayanan pemerintahan di wilayah perbatasan
2. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dengan memberikan perhatian luas pada upaya Peningkatan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan melalui terlaksananya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; kemudahan akses fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin dan masyarakat di kampung-kampung; tersedianya prasarana dan sarana pendidikan; terpenuhinya tingkat kesejahteraan guru khususnya bagi guru-guru yang berada di daerah terpencil; meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat utamanya bagi penduduk yang berada di kampung-kampung; penurunan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatnya usia harapan hidup.
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui peningkatan produksi perkebunan, peternakan, hortikultura dan kehutanan, peningkatan produksi perikanan dan kelautan, dan peningkatan pembangunan ditingkat kampung dan pelestarian lingkungan hidup.

4. Percepatan...../12

4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi, melalui terbangunnya sistem jaringan jalan, terutama menghubungkan kawasan pegunungan tengah, serta pusat-pusat permukiman, sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan tumbuh cepat, dalam sistem transportasi terpadu, penyediaan sumber-sumber energi murah hingga ke kampung-kampung, penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk kebutuhan rakyat di kampung-kampung, peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah serta peningkatan pembangunan tingkat kampung, penataan kawasan kampung dan dukungan pembangunan infrastruktur kampung.
5. Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja, melalui peningkatan investasi dari sumber PMA dan PMDN, meningkatkan nilai/harga pasar komoditas asal Papua dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka
6. Reformasi Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah serta Pemberantasan Korupsi, melalui penataan struktur organisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, terlaksananya sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta menurunnya tingkat pelayaghunaan kewenangan dan praktek KKN pada semua tingkatan pemerintah.
7. Pelaksanaan Otonomi Khusus secara menyeluruh, Konsisten dan Konsekuen, melalui penetapan Peraturan Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, ditetapkannya seluruh Perdasus dan Perdasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, terwujudnya pemahaman Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan melakukan amandemen pasal-pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang belum dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan masyarakat Papua.
8. Peningkatan ketentraman, supremasi hukum dan penegakan HAM, melalui peningkatan disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, penghargaan terhadap hak-hak khusus penduduk asli, mewujudkan tata hubungan antar masyarakat tanpa diskriminasi, serta penyelesaian konflik sosial kemasyarakatan secara damai berdasarkan prinsip kesetaraan.

2.3.3 Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan Tahun 2009

I. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan

Program Prioritas Pembangunan :

1. Program Pengembangan Permukiman;
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan ;
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4. Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak;
5. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
6. Program penataan hubungan Pemerintah dan masyarakat;
7. Program Pembinaan Lembaga-lembaga Politik;
8. Program Alat Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Kesejahteraan Sosial;
9. Program Pembinaan Kepahlawanan;
10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat;
11. Program Pembinaan Ex Penyandang Penyakit Sosial;
12. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

13. Program...../13

13. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
14. Program pengembangan ketrampilan SDM pencari kerja;
15. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
16. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
17. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja;
18. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
19. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
20. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif;
21. Program Usaha Kecil Menengah;
22. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
23. Program Pengembangan data/Informasi;
24. Program pengembangan Strategi pembangunan;
25. Kampung (RESPEK);
26. Program Penguatan kapasitas kelembagaan distrik dan kampung/kelurahan;
27. Program pemberdayaan masyarakat kampung;
28. Program optimalisasi fungsi kemitraan lembaga agama, adat dan pemerintah;
29. Program peningkatan pendapatan masyarakat kampung/ kelurahan dan kawasan miskin perkotaan;

Sasaran

- 1) Menurunkan angka penduduk miskin dan persentase rumah tangga miskin;
- 2) Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat kelurahan/kampung dan wilayah perbatasan;
- 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan tingkat kampung;
- 4) Optimalnya peran tiga tungku (agama, adat dan pemerintah) di kampung dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan/kampung.

II. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Pendidikan dan Kesehatan
Program Prioritas Pembangunan :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun;
3. Program pendidikan menengah (SMA);
4. Program pengembangan pendidikan tinggi;
5. Program pendidikan non formal;
6. Program pemberantasan buta aksara;
7. Program pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Program Manajemen pelayanan pendidikan;
9. Program penelitian dan pengembangan pendidikan;
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan; Perpustakaan;
11. Program peningkatan layanan perpustakaan;
12. Program peningkatan jangkauan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
13. Program peningkatan kesehatan perorangan;
14. Program promosi makanan dan gizi sehat bagi masyarakat di kampung;
15. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit;
16. Program peningkatan tenaga medis dan paramedis;
17. Program Obat dan perbekalan kesehatan;
18. Program Upaya Kesehatan masyarakat;
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
20. Program Perbaikan Gizi masyarakat;

21. Program...../14

21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
23. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
24. Program pengembangan sumber daya kesehatan;
25. Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Sasaran

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan usia dini;
- 2) Meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Papua;
- 3) Menurunnya angka buta aksara penduduk Usia 15 tahun keatas;
- 4) Menurunnya Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan;
- 5) Adil dan meratanya layanan pendidikan antara perkotaan dan perkampungan/kelurahan serta antara laki-laki dan perempuan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- 6) Meningkatkan kesempatan untuk belajar keperguruan tinggi yang bermutu;
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya;
- 8) Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan ;
- 9) Menurunnya angka penderita ISPA, malaria, CFR diare, angka kesembuhan TB Paru, penderita HIV-AIDS (ODHA);
- 10) Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang ;
- 11) Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan masyarakat; secara merata dan murah sampai di kampung-kampung terpencil;
- 12) Tersedianya Obat-obatan yang bermutu dan terjangkau sampai di kampung-kampung Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis dan para medis.

III. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil;
4. Produksi Peternakan;
5. Program Penerapan Teknologi Peternakan;
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peternakan;
7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian;
8. Perkebunan Lapangan;
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan);
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
12. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi dan Pasca Panen Pertanian/Perkebunan;
13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
14. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya;
15. Program Pengembangan Agribisnis;
16. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
17. Program Peningkatan kegiatan budidaya kelautan;
18. Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
19. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
20. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
21. Program Pengembangan Perikanan tangkap;
22. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan;
23. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

24. Program...../15

24. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
25. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan Perkiraan iklim laut;
26. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan;
27. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial;
28. Program Pengembangan industri kecil dan menengah;
29. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
30. Program pengembangan kawasan sentra produksi;
31. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
32. Program Penataan Struktur Industri;
33. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
34. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan;
35. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
36. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Sasaran

- 1) Pertumbuhan PDRB Pertanian
 - Pertumbuhan Tanaman Bahan Makanan;
 - Pertumbuhan Perkebunan;
 - Pertumbuhan Peternakan;
 - Pertumbuhan Perikanan.
 - 2) Menurunnya kasus illegal logging serta berkembangnya industri perkayuan;
 - 3) Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan;
 - 4) Menurunnya tingkat pengrusakan lingkungan;
 - 5) Melestarikan flora dan fauna yang dilindungi;
 - 6) Tersedianya perusahaan-perusahaan daerah dengan kapasitas manajemen profesional sehingga memiliki daya saing tinggi.
- IV. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi Program Prioritas Pembangunan :
1. Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan, menggunakan pendekatan Kawasan pengembangan (HUB);
 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
 3. Program Pembangunan Turap/Bronjong/Talud;
 4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base jalan dan jembatan;
 5. Program Pembangunan Fasilitas prasarana dan Sarana fasilitas perhubungan Darat;
 6. Program Kerja sama pembangunan untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
 7. Program pengendalian Banjir dan Pengamanan pantai;
 8. Program Penyediaan Air Baku;
 9. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 10. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya;
 11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya;
 12. Program Peningkatan Kapasitas Kampung dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 13. Program pembangunan prasarana dan Sarana
 14. Fasilitas perhubungan laut, menggunakan pendekatan Kawasan Pengembangan (HUB)
 15. Program Peningkatan pelayanan angkutan Laut;
 16. Program...../16

16. Program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan udara;
17. Program pembangunan dan Peningkatan prasarana, Sarana dan fasilitas Perhubungan Udara melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
18. Program pengembangan sistem Transportasi;
19. Program pembangunan sarana dan prasarana ASDP;
20. Program Peningkatan pelayanan ASDP;
21. Program Pengembangan Energi Murah Bagi Masyarakat;
22. Program Penyediaan Energi bagi Kebutuhan Pembangunan Industri;
23. Program Pengembangan Investasi Pembangunan Energi;
24. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
25. Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
26. Program Kerja sama pembangunan untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
27. Program pengembangan teknologi jasa telekomunikasi;
28. Program Pengembangan media komunikasi;

Sasaran :

- 1) Terbangunnya sistem jaringan jalan, terutama menghubungkan kawasan pegunungan tengah, serta pusat-pusat permukiman, sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan tumbuh cepat, dalam sistem transportasi terpadu;
- 2) Terbangunnya Sarana dan Prasarana perhubungan Darat, Laut dan Udara lintas Wilayah;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penerbangan, terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan kelancaran arus penumpang;
- 4) Tersedianya sumber-sumber energi murah hingga ke kampung-kampung;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana air bersih untuk kebutuhan rakyat di kampung-kampung, distrik dan Kabupaten/Kota;
- 6) Meningkatnya Jangkauan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi Papua;
- 7) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat;
- 8) Terlaksananya pola kerjasama Pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur.

V. Peningkatan Investasi, ekspor dan kesempatan kerja Program Prioritas Pembangunan :

1. Program peningkatan daya saing investasi;
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah;
5. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
8. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial;
9. Program Pengembangan industri kecil dan menengah;
10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
11. Program pengembangan kawasan sentra produksi;
12. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

Sasaran

- 1) Meningkatnya investasi dari sumber PMA dan PMDN;
- 2) Meningkatnya nilai/harga pasar komoditas asal Papua;
- 3) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

VI. Reformasi Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah serta Pemberantasan Korupsi

Program Prioritas Pembangunan :

1. Program Kerjasama Pembangunan;
2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
6. Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup;
7. Program Perencanaan Tata Ruang;
8. Program pengembangan wilayah perbatasan;
9. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
10. Program perencanaan pengembangan kota;
11. Program perencanaan pembangunan rawan bencana;
12. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
13. Program Penataan Organisasi Distrik dan Kampung;
14. Program Pengembangan Data dan Informasi;
15. Program perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa;
16. Program Pengelolaan Kekayaan/Aset Daerah;
17. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
18. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
19. Program Penyelenggaraan Pimpinan Pemerintahan Daerah;
20. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur;
21. Program penanganan pengaduan masyarakat;
22. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
23. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan;
24. Program Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran

- 1) Terwujudnya struktur organisasi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ;
- 2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ;
- 3) Optimalnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- 4) Tertatanya Arsip Daerah;
- 5) Terlaksananya sistem pengadaan barang dan jasa secara transparan;
- 6) Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- 7) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.

VII. Pelaksanaan Otonomi Khusus secara menyeluruh, Konsisten dan Konsekuen

Program Prioritas Pembangunan :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;;
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP dan DPRD;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MRP dan DPRD;
4. Program Kerjasama antar Pemerintah Daerah.

Sasaran...../18

Sasaran

- 1) Ditetapkan PERDASI dan PERDASUS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
- 2) Amandemen Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pembangunan Papua.

VIII. Peningkatan Ketentraman, Supremasi Hukum dan Penegakan HAM

1. Program Penegakan Hukum;
2. Program Pemberdayaan Lembaga Adat;
3. Program Pembinaan Disiplin dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum;
4. Program penataan hubungan Pemerintah dan masyarakat.

Sasaran

- 1) Terciptanya system keamanan dan ketertiban yang memadai dalam menanggulangi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan kejahatan trans-nasional terhadap eksistensi keamanan daerah;
- 2) Meningkatnya disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap hukum;
- 3) Terwujudnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua secara tuntas dan menyeluruh;
- 4) Terwujudnya penghargaan terhadap hak-hak khusus penduduk asli yang tinggi;
- 5) Terwujudnya tata hubungan antar masyarakat tanpa diskriminasi;
- 6) Terwujudnya penyelesaian konflik sosial kemasyarakatan secara damai berdasarkan prinsip kesetaraan.

Pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dan dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan Tahun 2008 yang telah dikemukakan di atas, maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan wilayah Papua yang damai, sejahtera dan aman serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua, strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dengan penekanan prioritas-prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (Growth Centered Development).
 - a. Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja;
 - b. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pengembangan Bumd;
 - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi.
2. Pembangunan yang bertumpu pada rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development).
 - a. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan;
 - b. Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Menjaga dan memelihara stabilitas pembangunan (Development Stability) dan kesinambungan pembangunan (Development continuity).
 - a. Pelaksanaan Otonomi Khusus, Secara Menyeluruh, Konsisten dan Konsekuen;
 - b. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah;

c. Manajemen...../19

- c. Manajemen Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- d. Peningkatan Ketentraman, Supremasi Hukum Dan Penegakan HAM.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2008 tersebut harus dilaksanakan secara sinergis baik antar sektor pembangunan, antar pelaku pembangunan maupun antar wilayah. Dari sisi kewilayahan, program-program prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada wilayah sasaran yang terdiri dari:

1. Kampung sebagai pusat pertumbuhan;
2. Daerah perbatasan;
3. Daerah terisolir dan terpencil;
4. Kawasan andalan;
5. Daerah Rawan Bencana.

BAB III

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan akan memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2007, perkiraan Tahun 2008 dan Tahun 2009 serta pembiayaan yang diperlukan. Gambaran kondisi ekonomi makro Provinsi Papua dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta berbagai kebijakan yang disusun untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan dan implementasi RPJM Provinsi Papua Tahun 2006-2011.

3.1. Kondisi Makro Ekonomi tahun 2007 dan prakiraan tahun 2008

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sangat berfluktuasi dan tidak beraturan. Keadaan demikian ini disebabkan oleh pertumbuhan produksi tambang konsntrat tembaga yang juga sangat berfluktuasi, sementara sumbangannya sangat besar rata-rata 65,07 persen sehingga gerak lajunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
Tahun 2005-2007

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	
	Termasuk Tambang (%)	Tanpa Tambang (%)
1	2	3
2005	36.40	6.09
2006	-17.20	8.71
2007	5.66	11.07

Sementara itu apabila pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang pertumbuhannya nampak stabil, berbeda signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Papua termasuk tambang baik dari besaran maupun trend pertumbuhannya. Apabila Papua tanpa tambang sektor yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah pertanian. Dan memang sektor inilah yang menghidupi masyarakat Papua pada umumnya, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Papua rata-rata sebesar 38,62 persen.

Kondisi makro ekonomi Papua pada Tahun 2007 menunjukkan adanya pertumbuhan positif sebesar 11,1%, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tersebut meningkat bila dibandingkan pada Tahun 2006 yang hanya tumbuh sebesar 8,71%. Pertumbuhan sebesar 11,1% didorong oleh percepatan pertumbuhan di semua sektor, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua berlangsung terus dan semakin membaik bila diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2000. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 19,43 trilliun meningkat sebesar 11,1 % bila dibandingkan Tahun 2006 sebesar Rp. 18,39 trilliun. Dan diperkirakan Tahun 2008 pertumbuhan

ekonomi...../20

ekonomi Papua akan lebih baik lagi dengan sebagian besar dana pembangunan khususnya dana Otonomi Khusus akan diarahkan langsung ke kampung dan distrik yang kesemuanya akan memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua.

Angka inflasi Tahun 2007 di wilayah Papua yang diproksi dengan laju inflasi kota Jayapura tercatat pada level yang cukup tinggi mencapai 10,34 persen lebih tinggi dari laju inflasi nasional yang mencapai 6,59 persen. Hal ini dipicu oleh laju inflasi kelompok bahan makanan, peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran sehingga menyebabkan kenaikan harga terutama pada komoditas-komoditas yang termasuk pada kelompok bahan makanan. Dan diperkirakan inflasi di wilayah Papua pada tahun 2008 masih berada pada level yang cukup tinggi, yang diperkirakan akan disumbang oleh kelompok bahan makanan, faktor lain yang memiliki potensi laju inflasi adalah cuaca dan ancaman badai dilautan yang sangat berpotensi menyebabkan laju inflasi yang tinggi. Inflasi juga akan dipengaruhi oleh meningkatnya harga-harga akibat faktor supply dari luar wilayah Papua yang terbatas dan kenaikan biaya pengiriman akibat kenaikan minyak dunia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua, pada Tahun 2006 sebesar 5,83 persen dan pada Tahun 2007 menurun menjadi 5,01 persen. Dan diharapkan pada Tahun 2008 akan menurun lagi seiring pertumbuhan ekonomi Papua yang semakin baik.

3.2. Lingkungan eksternal dan Internal tahun 2009

Gambaran ekonomi Papua Tahun 2009 akan dipengaruhi lingkungan eksternal yang berkembang secara nasional sebagai berikut :

Pertama, stabilitas moneter di dalam negeri mengalami tekanan eksternal berupa kenaikan suku bunga internasional dan meningkatnya harga minyak dunia, kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi. *Kedua*, kesenjangan global diperkirakan akan melebar kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan moneter internasional yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas moneter dalam negeri. *Ketiga*, persaingan internasional semakin meningkat, perekonomian dunia semakin terintegrasi menuntut daya saing perekonomian nasional lebih tinggi dan Papua khususnya. Persaingan juga meningkat untuk menarik investasi asing terutama oleh negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin dalam upaya mendorong perekonomiannya.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Papua adalah sebagai berikut :

Pertama, pelaksanaan rencana strategis pembangunan kampung (respek) yang memasuki tahun ke 3 (tiga), kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. *Kedua*, meningkatnya rasa aman dan tingginya partisipasi masyarakat terhadap seluruh kegiatan pembangunan.

3.3. Prospek Ekonomi Tahun 2009

Gambaran ekonomi makro Papua Tahun 2009 akan sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan global, regional, nasional yang merupakan perkembangan eksternal seperti liberalisasi perdagangan dan kebijakan investasi pemerintah, kepastian hukum dan regulasi fiskal, moneter, dan perkembangan perekonomian daerah sendiri (internal) yang antara lain system pengelolaan anggaran yang lebih berhati-hati dan langsung diarahkan ke kampung dan distrik, serta pembenahan kelembagaan dari kaya struktur menjadi kaya fungsi dengan piramida terbalik, sehingga mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2009 diharapkan akan lebih baik dibanding Tahun 2007 dan 2008, karena adanya investasi pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan, air bersih, energi dan lain-lain yang akan mendorong berbagai kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, selain itu juga karena pada Tahun 2009 diharapkan dengan pembangunan kampung dan distrik yang memasuki tahun ke 3 (tiga) dalam RPJMD

Papua akan mendorong kegiatan riil ekonomi masyarakat di kampung, distrik dan kota, karena sebagian besar dana pembangunan khususnya dana Otonomi Khusus akan diarahkan langsung ke kampung dan distrik yang kesemuanya akan memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua.

Dengan adanya upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter, laju inflasi, nilai tukar dan tingkat suku bunga bank maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap prospek perekonomian Papua pada Tahun 2009.

Dengan makin baiknya kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan di Papua akan mendorong masuknya investasi baru seperti perkebunan, perikanan, dan lain-lain.

Selain itu juga perkembangan perkreditan di Papua akan semakin meningkat, hal ini ditunjukkan total penghimpunan dana masyarakat dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh perbankan di Papua pada triwulan IV-2007 mencapai 17.590,51 miliar rupiah. Pada triwulan IV-2007 DPK tumbuh sebesar 15,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian UKM dan Koperasi diharapkan akan semakin meningkat, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan di sektor riil.

Berdasarkan gambaran perekonomian yang disebutkan diatas dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang akan mempengaruhi perekonomian Papua, maka diharapkan prospek perekonomian Papua pada tahun 2009 berupa :

a. Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Positif dan Berkualitas.

Dengan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terbuka dengan pembukaan lapangan kerja baru seperti dibidang pertanian, industri kecil dan rumah tangga, jasa-jasa, konstruksi dan lain-lain akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin signifikan dan lebih tinggi dari tahun 2008, sehingga upaya pengurangan pengangguran dapat dikurangi secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Signifikan dan Berkualitas

Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan, namun demikian tidak bisa diabaikan peranan sektor lainnya seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan hotel, pemerintah, dan perbankan, namun diakui pula bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat juga semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

c. Terciptanya Stabilitas Ekonomi yang Terkendali dan Mantap.

Untuk menjaga momentum pembangunan, maka stabilitas ekonomi yang mantap pada tahun 2009 akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, untuk itu momentum ini harus dijaga dengan baik, dan sejalan dengan itu diharapkan inflasi dapat tetap bertahan pada tingkat yang lebih terkendali dan lebih rendah dari tahun 2006. Dengan berkembangnya kegiatan pengelolaan sumber daya alam akan mendorong meningkatnya ekspor Papua ke luar negeri.

3.4. Pembiayaan Pembangunan

a. Keuangan Daerah

Ketahanan fiskal Daerah terus ditingkatkan. Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2008 termasuk Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan sebesar Rp.1.182.734.554.000,-, yang terdiri dari Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp.1.017.974.021.000,-, Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp.149.016.000.000,- dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) sebesar Rp.6.827.040.000,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.8.917.493.000,-.

Sedangkan...../22

Sedangkan pada Tahun 2009 estimasi penerimaan sektor Pendapatan Daerah Provinsi (PAD) Provinsi Papua sebesar Rp.342.143.000.000,- dan Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) sebesar Rp.419.000.000,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.3.795.748.000.000,-. Selain itu, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan akan lebih meningkat dari tahun 2009, dimana penerimaan tahun 2008 sebesar Rp.539.718.000.000,-, dengan demikian kapasitas sumber penerimaan untuk anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan pada tahun 2009 menjadi lebih meningkat. Disisi lain terus diupayakan program optimalisasi penerimaan Daerah, dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal, sebagai sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2009 sebesar Rp.6.398.810.158.752,- meningkat sebesar Rp.950.019.458.752,- atau 17,44 persen bila dibandingkan pada tahun 2008 sebesar Rp.5.448.790.700.000,- dengan komposisi sebagai berikut : PAD/DDP sebesar Rp.342.143.000.000,- DAU sebesar Rp.976.295.000.000,-, DAK sebesar Rp.750.000.000.000,-, Dana Perimbangan sebesar Rp.2.145.295.000.000,- dan Dana Penerimaan Khusus/DPK (OTSUS) sebesar Rp.3.295.748.000.000,-

Sedangkan pada Tahun 2009 diharapkan pendapatan daerah dari dana penerimaan khusus (OTSUS) meningkat sehingga total adalah sebesar Rp.3.795.748.000.000,- yang berarti mengalami peningkatan sebesar 15,17 persen khusus untuk dana Penerimaan Khusus (OTSUS).

b. Investasi dan Sumber Pembiayaan

Berdasarkan analisis kebutuhan serta evaluasi permasalahan pokok pembangunan Provinsi Papua, kebutuhan investasi pada Tahun 2008 sebesar Rp.46.500.000.000.000,- dan pada Tahun 2009 diharapkan sebesar Rp.50.000.000.000.000,-

Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri, juga disalurkan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti BPR, asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan langkah terobosan tersebut (dalam kondisi tersebut), berbagai sumber dana dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan pencurian sumberdaya laut, sumberdaya hutan dan mineral), serta optimalisasi program intensifikasi dan ekstensifikasi.

c. Proyeksi Keuangan Provinsi Papua

Keuangan Pemerintah Provinsi Papua dapat dikelola dengan baik jika dilakukan perencanaan keuangan, menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. Mengingat sumber-sumber pendapatan daerah bertumpu pada PKB/BBNKB yang merupakan pajak kebendaan (zaakelijik belasting) maka pertumbuhannya dipengaruhi oleh trend konsumsi masyarakat dan perencanaannya didasarkan pada asumsi indikator ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, PDRB, tarif dan pertumbuhan penduduk serta pertimbangan realisasi pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir dan rencana kinerja pendapatan daerah.

Berdasarkan pertumbuhan pendapatan dengan menggunakan pertumbuhan 2 (dua) tahun terakhir, proyeksi rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sekitar 23,20 persen. Agar tidak terjadi defisit, maka rencana pertumbuhan jenis belanja dibawah pertumbuhan pendapatan dengan asumsi bahwa belanja pegawai/aparatur pertumbuhannya relatif rendah mengingat belanja ini harus terlebih dahulu dibayar.

Dengan menggunakan asumsi diatas, diperoleh gambaran proyeksi keuangan tahun 2009 sebagai berikut :

Jenis Pendapatan	Proyeksi Keuangan
PAD	Rp. 342.143.000.000,-
Dana Perimbangan	Rp. 2.145.295.000.000,-
Lain-lain PAD yang sah	Rp. 3.795.748.000.000,-
Total Pendapatan	Rp. 6,283,186,000,000,-

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Papua

Untuk mempercepat pembangunan daerah, maka pemerintah Provinsi Papua perlu mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah lainnya melalui bantuan swasta dan luar negeri (hibah dan grant).

Upaya-upaya peningkatan kemampuan pembiayaan daerah maupun upaya-upaya peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah, terus menerus dilakukan secara berkesinambungan antara lain :

1. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui :
 - Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
 - Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
 - Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
 - Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.
 - Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan.
 - Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik belanja aparatur maupun belanja publik.
 - Transparansi APBD.
 - Kerjasama pembangunan, baik antar Pemda dan antar negara, dengan masyarakat dan swasta maupun lembaga-lembaga donor.
 - Privatisasi berbagai pelayanan Publik maupun BUMD/Perusahaan Daerah.
 - Revitalisasi pembiayaan indikatif
2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan yang ada.
 - Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik belanja aparatur maupun belanja publik
 - Transparansi APBD.
 - Kerjasama pembangunan, baik antar Pemda dan antar negara, dengan masyarakat dan swasta maupun lembaga-lembaga donor.
 - Privatisasi berbagai pelayanan Publik maupun BUMD/Perusahaan Daerah
 - Revitalisasi aset-aset Pemda.
 - Pengembangan berbagai kebijakan program/ kegiatan pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional.
 - Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
 - Penetapan standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

BAB IV

AGENDA MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.1. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, di Provinsi Papua Secara Menyeluruh, Konsisten dan Konsekuen.

A. *Kondisi Umum*

Dalam kurun waktu 5 tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, masih terdapat beragam kendala serius dalam implementasinya. Paradigma pembangunan yang diafiliasikan telah mengalami *distorsi* yang berkepanjangan. Keberpihakan kepada Penduduk Asli Papua masih pada tataran wacana yang seringkali disuarakan oleh para elite dimana Penduduk Asli Papua belum dapat direalisasikan secara optimal.

Yang dihadapi saat ini adalah ketidak seriusan dalam implementasinya, karena : *Pertama*, Undang-undang tersebut masih bersifat statis, belum disertai dengan penjabarannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang lengkap dan memadai. Hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua. Demikian halnya dengan amanah tentang Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), sehingga belum dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan masyarakat Papua sepenuhnya. *Kedua*, pemahaman tentang kandungan maksud undang-undang tersebut belum sepenuhnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan juga ke seluruh pejabat pemerintahan hingga ke tingkat pusat. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi yang beragam tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Terjadi tarik menarik kepentingan dalam membahasakan undang-undang tersebut. Maka, yang nampak di permukaan adalah kecenderungan berebut kuasa dan kewenangan. *Ketiga*, adanya perubahan sikap dan perilaku kebijakan dari pemerintah pusat yang didukung oleh sebagian elite di Papua yang seringkali tidak konsisten dan konsekwen. Sebagai contoh kasus dengan adanya pemekaran daerah yang tidak sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2001 serta ketidakkonsistenan Undang-undang dan Peraturan-peraturan pemerintah dengan semangat Otonomi daerah terutama lagi dengan jiwa Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

B. *Sasaran Pembangunan*

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, di Provinsi Papua Secara Menyeluruh, Konsisten dan Konsekuen adalah:

- a) Disusunnya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus;
- b) Ditetapkannya Perdasus dan Perdasi sesuai amanat UU No. 21/2001;
- c) Terwujudnya pemahaman tentang UU No. 21/2001 secara optimal;
- d) Kajian tentang amandemen pasal-pasal UU No. 21/2001 yang belum dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan masyarakat Papua.

C. *Arah Kebijakan*

Upaya-upaya pencapaian sasaran-sasaran tersebut, diarahkan pada kebijakan:

- a) Memprakarsai dan membangun hubungan sinergis serta harmonis dengan pemerintah pusat dan stakeholder dalam rangka penetapan PP sesuai amanat UU Nomor 21/2001;
- b) Memprakarsai dan membangun hubungan sinergis serta harmonis dengan DPRD, MRP dan stakeholder dalam rangka penyusunan seluruh Perdasus dan Perdasi sesuai amanat UU Nomor 21/2001;

c) Penyebarluasan...../25

- c) Penyebarluasan dan pendalaman materi UU Nomor 21/2001 ke seluruh lapisan masyarakat dan instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- d) Melakukan kajian dalam rangka amandemen pasal-pasal UU Nomor 21/2001.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

4.1.2. Pembenahan sistem Pemerintahan Daerah pada semua jajaran dan tingkatan

A. Kondisi Umum

Kondisi obyektif yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kinerja pemerintahan yang belum maksimal. Dalam banyak hal, sistem pemerintahan di daerah ini cenderung lamban dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang sangat dinamis. Adalah suatu kenyataan di mana variabilitas tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi, sementara mesin pemerintahan bergerak lamban, tidak efektif, dan tidak efisien.

Dengan demikian diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi pemerintahan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan, revitalisasi aparatur pemerintahan sehingga menjadi handal dan berkemampuan profesional.

Dengan demikian, sistem pemerintahan daerah di semua jajaran dan tingkatan dapat menunjukkan kinerja yang kompetitif dan antisipatif. Sebab sejak era reformasi Indonesia bergulir, Pemerintah daerah dan masyarakat di Tanah Papua, telah diperhadapkan pada : *Pertama*, tantangan domestik yang sedang dan akan berlangsung kian dinamis, di mana pemerintah provinsi Papua harus memiliki tekad bulat dan kekuatan mengatasi gelombang tuntutan masyarakat modern dalam upaya mencapai kesejahteraannya yang mandiri dan bermartabat. *Kedua*, intervensi kekuatan global sejak awal 1990-an tidak akan berhenti, dan bahkan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi modern yang telah menembus sekat-sekat dan batas-batas dunia.

B. Sasaran

Dari serangkaian masalah di atas, ditetapkan sasaran pencapaiannya sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Struktur organisasi pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota yang mencerminkan kebutuhan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai amanat UU No. 21/2001 dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- b) Tertatanya organisasi dan manajemen pemerintahan distrik dan kampung sesuai amanat UU No. 21/2001 dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- c) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
- d) Terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel;
- e) Optimalnya perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan;
- f) Tertatanya arsip pemerintah daerah secara baik;
- g) Terlaksananya sistem pengadaan barang dan jasa secara transparan;
- h) Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

C. Arah Kebijakan

Adapun langkah-langkah kebijakah yang ditempuh untuk mencapai sasaran-sasaran dimaksud, diarahkan pada :

- a) Terwujudnya Struktur organisasi pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota yang mencerminkan kebutuhan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai amanat UU Nomor 21/2001;

b) tertatanya...../26

- b) Tertatanya organisasi dan manajemen pemerintahan distrik dan kampung sesuai amanat UU No. 21/2001;
- c) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
- d) Terciptanya sistim kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel;
- e) Optimalnya perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan;
- f) Tertatanya arsip pemerintah daerah secara baik;
- g) Terlaksananya sistem pengadaan barang dan jasa secara transparan;
- h) Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

4.1.3. Perencanaan dan pembinaan personil Pemerintah Daerah pada semua jajaran dan tingkatan

A. Kondisi Umum

Krisis kepercayaan yang melanda pemerintahan, terkait dengan penilaian publik terhadap kinerja pegawai negeri yang bersifat negatif, sehingga menjadi salah satu inspirasi lahirnya wacana reformasi pemerintahan. Maraknya perbincangan tentang perilaku dan disiplin pegawai di berbagai kalangan menjadi indikasi yang sangat kuat pada lahirnya tuntutan peningkatan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan, maka dipandang perlu memperhatikan urgensi dari pembinaan motivasi dan disiplin ke arah penciptaan kepastian kerja; selektivitas dalam rekrutmen serta promosi jabatan. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Papua hendaknya menjadikan otonomi khusus sebagai *inspirasi* reformasi kepegawaian yang mempertimbangkan pers-pektif pengembangan dan pembinaan tidak saja kariernya tetapi juga kompetensinya. Beberapa hal utama berkaitan dengan itu adalah perlu melakukan *repositioning* fungsi aparatur pemerintahan, antara lain : melakukan analisis kebutuhan pegawai yang akurat, mengelola kepegawaian ke arah terciptanya kemampuan prima, mengelola diversivitas profesionalisme kerja untuk meraih keunggulan bersaing, distribusi pegawai negeri hingga ke tingkat distrik.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditetapkan sasaran pencapaiannya yaitu :

- a) Optimalnya penggunaan analisis kebutuhan pegawai;
- b) Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengelola pemerintahan;
- c) Meratanya persebaran pegawai hingga ke tingkat distrik.

C. Arah Kebijakan

Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada :

- a) Penyusunan analisis kebutuhan pegawai sampai ketinggian Kampung.
- b) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola pemerintahan;
- c) Meningkatkan penyebaran pegawai hingga ke tingkat distrik.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

4.1.4. Operasi pemberantasan KKN

A. Kondisi Umum

KKN, banyak diknotasikan sebagai perbuatan keji yang bersarang ditubuh pemerintahan, meskipun diketahui KKN juga berjangkit dan terjadi pula di sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada

Umumnya...../27

umumnya. Dalam hubungan reformasi sistem pemerintahan, di mana urusan-urusan publik yang diltangani oleh pemerintah sebagai leading, namun secara aktual, interaksi lembaga pemerintahan (atau person) dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat (atau person) dalam hubungan “upah-biaya” tidak dapat dihentikan. Dalam hubungan “interaksi dengan publik utamanya terkait dengan pelayanan publik” itulah dapat berkembang dengan suburnya praktek-praktek KKN. Tetapi tanpa interaksi itu, secara kelembagaan per se, KKN dapat menjadi berkembang subur jika tidak konsisten dan taat prosedur dan ada penyelewengan kekuasaan. Sebenarnya, banyak faktor yang menjadi sumber KKN yang pada dasarnya bersumber dari ketidak beresan moral manusia, misalnya saja : kebiasaan mengambil barang orang lain tanpa izin, upaya pemenuhan kebutuhan secara terpaksa misalnya karena dililit hutang, kebiasaan berfoya-foya, keinginan meningkatkan status sosial atau mencukupkan kebutuhan keluarga tetapi tingkat upah minim.

Sebab itu, usaha pemberantasan KKN perlu dilihat dalam konteks reformasi sistem pemerintahan secara keseluruhan. Dalam hubungan itu, agenda utama yang perlu ditempuh diwujudkan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN.

Salah satu aspek penting terkait dengan kinerja pegawai adalah perbaikan struktur dan jumlah upah pegawai, dengan asumsi bahwa ketika kebutuhan pegawai tercukupi apalagi mampu menabung, maka KKN dapat ditekan.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditetapkan sasaran pencapaiannya yaitu :

- a) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN pada semua tingkatan pemerintahan.

C. Arah Kebijakan

Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada upaya memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yaitu:

- a) Meningkatkan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi pengawasan dengan cara mengoptimalkan peran Badan Pengawasan Daerah, Pengawasan melekat dan pengawasan Masyarakat;
- b) Tunjangan Kompensasi bagi lembaga pengawasan; dan dukungan fasilitas;
- c) Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, dengan cara menindak secara tegas terhadap pejabat yang terlibat korupsi;
- d) Meningkatkan kualitas pengawasan lembaga audit;
- e) Penyempurnaan dan percepatan implementasi pedoman pelayanan pengaduan masyarakat.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 4.1.5. Mendorong berfungsinya lembaga-lembaga pengawas dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bekerja secara optimal

A. Kondisi Umum

Pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memiliki instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang jujur bersih dan berwibawa.

Pengawasan bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat pemerintahnya.

Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pengawasan ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktifitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktifitas wajib dan mulia. Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap pemerintah adalah wajib.

Tak kalah pentingnya lembaga penegak hukum, amat didambakan agar dapat yang menjalankan tugas dan fungsi secara profesional.

B. Sasaran

Penetapan sasaran terkait dengan masalah tersebut yaitu

- a) Meningkatkan peran, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pengawas dan lembaga-lembaga penegak hukum;
- b) Berkurangnya penyalahgunaan kewenangan.

C. Arah Kebijakan

Masalah tersebut dapat ditangani dengan:

- a) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pengawas dan lembaga-lembaga penegak hukum;
- b) Meningkatkan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi pengawasan dengan cara mengoptimalkan peran Badan Pengawasan Daerah, Pengawasan melekat dan pengawasan Masyarakat;
- c) Tunjangan Kompensasi bagi lembaga pengawasan; dan dukungan fasilitas.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 4.1.6. Mendorong lembaga-lembaga politik (infrasutruktur dan suprastruktur politik) untuk berfungsi sebagai lembaga demokrasi dan membangun budaya politik yang sehat, dewasa dan bermutu.

A. Kondisi Umum

Proses Pemilihan kepala daerah yang lalu telah berjalan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat dan telah menghasilkan Gubernur terpilih langsung oleh masyarakat menandakan Demorasi telah berjalan di Papua.

Momentum untuk menjadikan demokrasi sebagai kerangka kerja politik dalam melakukan reformasi sistem pemerintahan di Tanah Papua yang di dalamnya mengatur pola hubungan kekuasaan telah berkembang pesat sebagai wacana publik. Tetapi fenomena yang mendominasi wacara tersebut adalah bahwa konsolidasi demokrasi telah menjadi urusan kaum elite dan meninggalkan peran-peran strategis dari masyarakat Papua. Maka, dapat disaksikan bahwa konsolidasi demokrasi oleh para elite politik telah menghadapi kegagalan serius. Beberapa fakta bisa ditunjukkan, antara lain : *Pertama*, Lembaga-lembaga demokrasi mengalami *malfungsi* misalnya berubah menjadi kumpulan para politisi yang sekedar mencari *power dan otoritas* atau kekayaan; dan bahkan sikap dan tindakannya terkesan tidak merepresentasikan konstituennya. *Kedua*, depolitisasi masyarakat terus berlangsung dengan gejala berupa pengerahan massa yang sama sekali tak paham arah dan maksud perjuangan lembaga politiknya.

B. Sasaran

Adapun sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam kerangka endorong lembaga-lembaga politik (infrastruktur dan supra-struktur politik) untuk berfungsi sebagai lembaga demokrasi dan membangun budaya politik yang sehat, dewasa dan bermutu, adalah :

- a) Optimalnya...../29

- a) Optimalnya peran lembaga-lembaga suprastruktur dan infra-struktur politik dalam pembinaan demokrasi;
- b) Terwujudnya budaya politik yang sehat, dewasa dan bermutu.

C. Arah Kebijakan

Untuk kepentingan pencapaian sasaran-sasaran tersebut ditempuh langkah-langkah kebijakan yang diarahkan pada :

- a) Optimalisasi peran lembaga-lembaga suprastruktur dan infra-struktur politik dalam pembinaan demokrasi;
- b) Mewujudkan budaya politik yang sehat, dewasa dan bermutu.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 4.1.7. Mendorong berfungsinya LSM sebagai wadah masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

A. Kondisi Umum

Lembaga sosial Masyarakat adalah mitra pemerintah dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Karena itu selalu diposisikan sejajar dalam rangka bahu membahu membela aspirasi masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa eksistensi lembaga sosial masyarakat adalah modal kekuatan pembangunan. LSM, sebagai lembaga di luar pemerintahan adalah representasi dari pengakuan bahwa kekuatan dan kekuasaan itu bukanlah milik pemerintah saja. Sebab beberapa fakta konkrit menjelaskan secara gamblang mengenai peran dan kiprah LSM dalam membantu memberdayakan masyarakat tanpa sokongan sumberdaya yang me-madai dari pemerintah. Relawan-relawan tersebut adalah juga pejuang pembangunan yang patut diberi penghargaan yang tinggi.

B. Sasaran

- a) Terciptanya kerjasama yang harmonis antara LSM dan Pemerintah;
- b) Meningkatnya kapasitas LSM dalam Pembangunan.

C. Arah Kebijakan

- a) Meningkatkan kerjasama LSM sebagai mitra pemerintah daerah;
- b) Memfasilitasi peningkatan kapasitas LSM dalam pembangunan.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II)

- 4.1.8. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat dalam rangka menata dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan

A. Kondisi Umum

Keberadaan lembaga-lembaga adat dalam masyarakat bisa dikatakan sangat eksis dan memiliki peran yang besar, tetapi harus diakui bahwa selama ini belum diberikan peran yang cocok dan optimal dan mengemban tugas-tugas pembinaan kepada masyarakat.

B. Sasaran

- a) Terciptanya kerjasama yang harmonis antara Lembaga adat dan Pemerintah;
- b) Meningkatnya kapasitas Lembaga adat dalam Pembangunan.

C. Arah Kebijakan

- a) Meningkatkan kerjasama Lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah;
- b) Memfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga adat dalam pembangunan.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran).

- 4.1.9. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga Agama untuk ikut memberikan kontribusi yang bernilai dalam memberikan koreksi dan arah serta semangat rohani dalam proses pembangunan

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan pelayanan di daerah terpencil dan terisolir banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga agama. Baik dari pengembangan pendidikan, kesehatan perekonomian dan pengembangan infrastruktur masyarakat. Namun peran Lembaga-lembaga agama dalam memberikan koreksi dan arah serta semangat rohani dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan.

B. Sasaran

- a) Meningkatkan peran Lembaga-lembaga agama dalam memberikan koreksi dan arah serta semangat rohani dalam proses pembangunan;
- b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam proses pembangunan di daerah terpencil dan terisolir.

C. Arah Kebijakan

- a) Fasilitasi peran Lembaga-lembaga agama dalam memberikan koreksi dan arah serta semangat rohani dalam proses pembangunan;
- b) Fasilitasi peran lembaga-lembaga agama dalam proses pembangunan di daerah terpencil dan terisolir.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

BAB V

AGENDA MEMBANGUN TANAH PAPUA
YANG DAMAI DAN SEJAHTERA

- 5.1.1. Melanjutkan Program TURKAM (Turun kampung)

A. Kondisi Umum

Masyarakat kampung sebagai pemilik wilayah dan pemilik pembangunan belum tersentuh secara langsung dampak pembangunan. Di mana sebagian besar masyarakat miskin dan terpencil ada di kampung yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya. Untuk itu sasaran utama adalah masyarakat miskin diseluruh pelosok sampai pada wilayah perbatasan negara di Provinsi Papua dengan melakukan terobosan langsung melalui penggunaan Dana Otsus dan pengerahan seluruh kekuatan yang berada pada Lembaga Pemerintah dan non pemerintah untuk menjangkau dan membangun semua permukiman dan perkampungan sampai pada wilayah perbatasan RI-PNG dan berbagai kelompok masyarakat.

Prioritas program/kegiatan turun ke kampung diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat merubah cara pandang dan pola hidup penduduk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di kampung. Dengan demikian, bentuk nyata kegiatan pembangunan tersebut dapat berwujud perbaikan permukiman dan perumahan penduduk, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, pembangunan perkampungan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan rakyat yang bertumpu pada tiga (3) tungku di kampung (agama, adat dan pemerintah) serta penagrutatamaan gender.

B. Sasaran...../31

B. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai berkenaan dengan proses penanganan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya di kampung/kelurahan, oleh Karena itu sasaran yang ingin diacapai selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

- a) Menurun angka persentase rumah tangga miskin dari 72,72 % menjadi 40 %;
- b) Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat kelurahan/kampung;
- c) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah kampung;
- d) Optimalnya peran tiga tungku (agama, adat dan pemerintah) di kampung dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan/ kampung;
- e) Meningkatnya peran Perempuan dalam pembangunan;
- f) Optimalnya pemanfaatan SDM, SDA dan Keuangan bagi kesejahteraan masyarakat asli Papua di distrik dan kampung.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu lima tahun kedepan, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut ;

- a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan/kampung melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, alokasi dana otsus yang menjangkau, menyentuh dan membangun semua kampung dan kelompok masyarakat miskin, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kampung dan mengoptimalkan peran kemitraan tiga tungku (agama, adat dan pemerintah) dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan/kampung.
- b) Melanjutkan pembangunan distrik dan kampung yang menjangkau dan menyentuh semua kelompok masyarakat yang miskin dan tertinggal di seluruh pelosok tanah papua melalui ; Terobosan langsung penggunaan dana Otsus ke tingkat distrik dan kampung dan di perbatasan, terobosan langsung program dari semua instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah ketingkat distrik dan kampung dan perbatasan, pemberdayaan masyarakat kampung melalui tiga tungku (Agama, Adat dan Pemerintah) dan pengembangan kemitraan dengan lembaga donor untuk fasilitasi perencanaan, pendanaan dan monitoring serta evaluasi.
- c) Mengembangkan peran Perempuan melalui upaya-upaya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

D Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 5.1.2. Mengembangkan perekonomian rakyat dengan komoditas-komoditas yang berorientasi pasar dengan nilai jual yang tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di kelurahan/kampung dan kawasan miskin di perkotaan.

A. Kondisi Umum

Membangun tanah Papua yang damai dan sejahtera ditempuh melalui pengembangan perekonomian rakyat dengan komoditas-komoditas yang berorientasi pasar dengan nilai jual tinggi dengan Fokus perhatian pada pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat yang mencakup urusan seperti : pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UKM, industri, penanaman modal serta pertambangan dan energi. Basis kebijakan diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui peningkatan kapasitas dalam mengelola usaha yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan masyarakat Papua yang adil dan sejahtera.

Bersamaan dengan itu, diharapkan pula lahirnya kesempatan kerja baru di berbagai bidang usaha untuk menyerap angkatan kerja kian bertambah

dari tahun...../32

dari tahun ke tahun dalam rangka mensukseskan kebijakan penurunan angka pengangguran. Dalam rangka pengembangan ekonomi dan ketenaga kerjaan ini, terus didorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan pada pengembangan teknologi usaha ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing serta lahirnya alternatif-alternatif baru dalam pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat.

Urusan pertanian merupakan fokus utama pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Kebijakannya diarahkan pada sektor-sektor : (a) Pertanian, yaitu : Pengembangan varietas unggul bermutu sesuai dengan daya guna tanah untuk tanaman jangka panjang dan jangka pendek, terutama Komoditas Unggulan Rakyat; Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan mutu intensifikasi; Perluasan areal tanam sesuai dengan ketersediaan lahan, baik melalui Peningkatan Intensitas Pertanaman (PIP) maupun Penambahan Baku Lahan (PBL); Penyediaan dan distribusi sarana prasarana produksi pertanian; dan Pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura. (b) Kelautan dan perikanan, yaitu : Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kelestariannya; Pengembangan penangkapan dan budidaya hasil laut dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat; Meningkatkan pengadaan infrastruktur kelautan dan perikanan. (c) Kehutanan, yaitu : Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta optimalisasi manfaat dan fungsi hutan; Pengembangan dan Rehabilitasi Hutan Lindung dan Lahan Kritis; Mengendalikan dan menjaga hutan sebagai paru-paru bumi dan pencegahan abrasi pantai.

Untuk kepentingan tersebut, berikut ini dideskripsikan berbagai masalah yang masih dihadapi pada semua bidang pembangunan ekonomi yang disertai dengan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang, arah kebijakan kegiatan prioritas sebagai berikut.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat kampung/kelurahan dan kawasan miskin perkotaan.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun guna pencapaian sasaran di atas yaitu *Mengembangkan perekonomian rakyat* melalui :

- a) Mengembangkan komoditas pertanian yang berorientasi pasar;
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil kerajinan rakyat;
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pembina pertanian;
- d) Melakukan tata niaga hasil produksi komoditi unggulan daerah;
- e) Menata lembaga ekonomi masyarakat;
- f) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pertanian;
- g) Mengembangkan sistim informasi pasar;
- h) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga donor luar negeri.

D Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 5.1.3. Terobosan langsung untuk menarik sumber-sumber dana dalam rangka penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri dengan ransangan berbagai kemudahan dan fasilitas.

A. Kondisi Umum

Penanaman modal merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kegiatan pembangunan daerah, karena penanaman modal atau investasi mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan dimasa yang

akan datang...../33

akan datang. Kegiatan investasi di Papua selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan investasi. Pembentukan modal tetap brutto investasi tersebut terkait erat dengan pembukaan usaha baru maupun pengembangan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat maupun untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Jumlah Proyek PMDN di Provinsi Papua terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, pada tahun 2005 realisasi penanaman modal naik sebesar 63,16 % jika dibandingkan dengan tahun 2004, penyerapan tenaga kerja tahun 2005 mengalami peningkatan 4,55% jika dibandingkan dengan Tahun 2004.

Sedangkan jumlah proyek PMA sampai dengan akhir Tahun 2005 mencapai 46 proyek dengan realisasi investasi sebesar US\$ 6,57 juta, mengalami peningkatan sebesar 0,88%, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2004 yaitu sebesar US\$ 6,52 juta. Pada Tahun 2005 realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.334 orang dimana sebanyak 15.811 orang asal Indonesia dan 523 orang tenaga kerja asing.

Tenaga kerja Indonesia yang diserap PMA/PMDN pada Tahun 2005 mencapai 28.256 orang, dan 32 % diantaranya adalah tenaga kerja asli Papua.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah ;

- a. Meningkatnya investasi dari sumber PMA dan PMDN;
- b. Meningkatnya nilai/harga pasar komoditas asal Papua;
- c. Membatasi barang-barang import ke Papua.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun guna menjawab permasalahan diatas adalah meningkatkan daya saing Papua dalam menarik penanaman modal melalui :

- a. Menata ulang perijinan dan birokrasi pelayanan pemerintah kepada investor;
- b. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga adat, agama dalam penyelesaian masalah tanah dan menjaga keamanan di Papua;
- c. Promosi investasi melalui event-event nasional, internasional, lembaga perwakilan pemerintahan asing yang ada di Indonesia, lembaga-lembaga donor luar negeri;
- d. Mengembangkan koordinasi yang optimal dengan pemerintah pusat untuk menjaga kepastian hukum penanaman modal di Papua;
- e. Menyusun perdusus dan perdasi guna menjaga kemitraan yang baik antara pemerintah daerah, investor dan masyarakat pemilik hak ulayat atas tanah;
- f. Pengembangan kemitraan dengan lembaga donor untuk fasilitasi perencanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi (Monev);
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi;
- h. Penentuan arah kebijakan dan pengembangan investasi;
- i. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan investasi.

D Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 5.1.4. Terobosan langsung untuk membuka perdagangan, ekspor dan impor luar negeri ke Provinsi Papua melalui pintu-pintu masuk (KAPET) dengan rangsangan berbagai kemudahan dan fasilitas.

A) Kondisi Umum

Di sektor perdagangan, Pemerintah Provinsi Papua akan mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka mendukung produksi dan distribusi hasil industri, menggalakkan kerja sama ekonomi lintas daerah dan negara, dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi industri dan

perdagangan melalui kebijakan terpadu. Penumbuhan sektor swasta di sektor perdagangan dan jasa berskala kecil dan menengah, perlu dipacu sebagai motor penggerak perekonomian daerah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Sejumlah permasalahan yang masih dihadapi saat ini, diupayakan penanganannya dengan berbagai program yang tepat sasaran dan terarah sesuai kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

B) Sasaran

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya nilai/harga pasar komoditas asal Papua;
- b. Menurunnya harga pasar barang-barang import ke Papua.

C) Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah ;

- a. Mengembangkan perdagangan luar negeri melalui ;
 - Ransangan berbagai kemudahan fasilitas dan aturan perdagangan luar negeri lewat pengembangan kawasan berikat atau KAPET;
 - Penataan ulang manajemen/pengelolaan KAPET;
 - Pemberdayaan dan penyiapan masyarakat di kawasan KAPET dan Kawasan andalan lainnya;
 - Pengembangan promosi untuk mengundang investor menanamkan modal di kawasan KAPET;
 - Pengembangan kemitraan dengan lembaga donor untuk fasilitasi perencanaan, pendanaan dan monitoring evaluasi (Monev).

D Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 5.1.5. Bekerja sama dengan KADIN dan lembaga-lembaga terkait mengembangkan program-program pembinaan kepada pengusaha kecil dan menengah (PKM) untuk menjadi pengusaha yang berbakat, semakin mampu dan mandiri.

A) Kondisi Umum

Pembangunan koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat, terus dikembangkan dengan maksud untuk menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi rakyat yang sejahtera. Sehubungan dengan itu maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diupayakan untuk mencapai sasaran secara optimal, yaitu meningkatnya peran koperasi dan PKM masyarakat sebagai wahana pengembangan ekonomi rakyat, sehingga berdaya dalam kemandiriannya berwirausaha. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur ekonomi yang memadai dan kemudahan akses permodalan.

Pengembangan lembaga koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dimaksudkan agar dapat mandiri dan dapat menjadi wadah dalam mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, melalui pembinaan dan pemberdayaan, peningkatan sistem jaringan kerjasama koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah serta peningkatan penerapan teknologi tepat guna melalui pengembangan institusi, penguatan akses modal, pembentukan dan penguatan jaringan kerjasama, mempermudah akses informasi pasar, bahan baku dan teknologi.

B) Sasaran

Meningkatnya kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam manajemen dan pengembangan perusahaan.

C) Arah kebijakan

- a. Mengembangkan manajemen usaha PKM melalui;
 - Pengembangan Small business incubators;
 - Mengembangkan kerja sama pembinaan dengan lembaga-lembaga lokal seperti KADIN dan lembaga manajemen perguruan tinggi;
 - Mengembangkan dan memperluas jaminan perkreditan UKM;
 - Mengembangkan kemitraan usaha antara UKM dengan PMA dan PMDN;
 - Memfasilitasi kegiatan promosi produk UKM di luar Papua dan luar negeri;
 - Pengembangan kemitraan dengan lembaga donor untuk fasilitasi perencanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi (monev).

D) Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 5.1.6. Mengembangkan program-program pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang trampil, bermutu dan tepat guna.

A. Kondisi Umum

Pembangunan ketenagakerjaan sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan ekonomi dalam arti luas, di mana sektor ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian suatu daerah. Atas dasar pemikiran itulah, maka Pemerintah Provinsi Papua dalam tahun 2007 berupaya untuk mengembangkan sektor ini dengan menitik beratkan pada kebijakan penumbuhan sikap dan etos kerja mandiri serta peningkatan kualitas tenaga kerja, menggerakkan sektor swasta dalam memperluas kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja .

Dalam rangka memecahkan masalah ketenaga kerjaan di Provinsi Papua, maka diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Pengembangan SDM Papua bidang ketenaga kerjaan pada dasarnya diarahkan untuk memungkinkan masyarakat asli Papua mengambil manfaat ekonomi, sosial dan politik yang sebesar-besarnya dengan melibatkan diri sebagai tenaga kerja bermutu pada semua jenis dan tingkatan pekerjaan memperoleh pendapatan yang memadai.

Masalah ketenagaakerjaan, sasaran dan arah kebijakan serta program pembangunan yang akan ditempuh sebagai berikut

B. Sasaran

- a. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja (pencari kerja) untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia
- b. Tersedianya fasilitas penunjang pada BLK
- c. Terpenuhinya tenaga instruktur pada BLK sesuai program
- d. Meningkatnya daya minat bagi mereka yang mengembangkan diri melalui pelatihan, job training dan ketrampilan.

C. Arah Kebijakan

- a. Meningkatnya ketrampilan pencari kerja melalui ;
 - Pembinaan dan pembantuan bagi lembaga ketrampilan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat/swasta;
 - Pengembangan kemitraan dengan lembaga donor dalam pembiayaan
 - Peningkatan SDM dan fasilitas lembaga ketrampilan Pemerintah daerah;

- Pengembangan kemitraan dengan lembaga donor untuk fasilitasi perencanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi serta evaluasi (Monev);
- b. Meningkatkan jumlah fasilitas penunjang pada BLK;
- c. Rekrutmen tenaga instruktur yang berpengalaman;
- d. Peningkatan pelatihan dan ketrampilan.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

5.1.7. Meningkatkan program-program pendidikan yang menitik beratkan kepada perbaikan /peningkatan MUTU pendidikan pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan dengan pembebanan biaya pendidikan yang serendah-rendahnya bagi masyarakat.

A. Kondisi Umum

Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Papua dalam tahun 2007 didasarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Pemerintah Provinsi Papua telah menempatkan urusan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam menyusun program pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini didasarkan pada 2 hal utama yaitu *pertama*, kondisi riil pembangunan pendidikan dan kesehatan hingga yang masih memprihatinkan. *Kedua*, pengarus utamaan dalam kerangka kebijakan pembangunan berdasarkan undang-undang otonomi khusus Nomor. 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Papua saat ini dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu untuk dicermati dengan baik, diantaranya pembangunan pendidikan pra sekolah dalam rangka menyiapkan calon anak didik dalam memasuki jenjang pendidikan formal sehingga dapat menjawab kesiapan kualitas sumber daya manusia Papua kedepan.

B. Sasaran

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah ;

- a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan usia dini;
- b) Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk Papua yang ditunjukkan dengan;
 - APM SD 95 %, SLTP 56 %, SLTA 45 %.
 - Meningkatnya APK SD menjadi 110 %, SLTP 89 %, SLTA 55 %;
- c) Angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan menurun pada tingkat SD menjadi 2,5 %, SLTP 2 % dan SLTA 1,5 %;
- d) Adil dan meratanya layanan pendidikan antara perkotaan dan perkampungan/kelurahan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- e) Meningkatnya kesempatan untuk belajar keperguruan tinggi yang bermutu;
- f) Meningkatnya kualitas perguruan tinggi;
- g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- h) Terlaksananya manajemen berbasis sekolah;
- i) Tertuntasnya penduduk penyandang buta aksara;
- j) Meningkatnya minat baca masyarakat;
- k) Optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
- l) Meningkatnya prestasi olah raga.

C. Arah Kebijakan

Berdasarkan uraian sasaran diatas, maka arah kebijakan yang disusun untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah;

- a) Melaksanakan pendidikan anak usia dini melalui pembentukan dan penguatan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b) Mempercepat penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- c) Meningkatkan mutu dan layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- d) Meningkatkan kesempatan belajar ke perguruan tinggi yang bermutu melalui kerjasama dan pemberian beasiswa;
- e) Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui dukungan peningkatan mutu dosen dan sarana prasarana pendidikan tinggi;
- f) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- g) Meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
- h) melaksanakan penuntasan buta aksara;
- i) Meningkatkan minat baca masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan, bahan bacaan dan pustakawan;
- j) Mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi kepemudaan;
- k) Meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyediaan sarana prasarana olah raga;

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 5.1.8. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau dan melayani masyarakat dimanapun diseluruh pelosok tanah Papua dengan titik berat kepada upaya pencegahan penyakit dan kebijakan pembebanan biaya kesehatan yang serendah-rendahnya.

A. Kondisi Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Penyelenggaraannya meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan bukan saja untuk penyembuhan penderita, tetapi menitik beratkan kepada promosi dan pencegahan penyakit. Dengan demikian, pembangunan kesehatan yang akan dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rahabilitatif).

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta diarahkan, dibina dan dikembangkan dalam rangka melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah daerah. Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dititik-beratkan pada pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan.

B. Sasaran

- a. Meningkatkan umur harapan hidup menjadi 70,6 tahun;
- b. Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan hingga 275/100.000 KLH;
- c. Menurunnya angka penderita ISPA sampai 2,40%, malaria 40/1000 Pddk, CFR diare kurang dari 1 %, angka kesembuhan TB Paru 85 %, penderita HIV-AIDS (ODHA) mendapat ARV 100 %;

d.Menurunnya...../38

- d. Menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita sampai 15 %;
- e. Meningkatnya jangkauan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata sampai di kampung-kampung terpencil;
- f. Meningkatnya cakupan pelayanan Bumil (K4) sampai 80 %;
- g. Meningkatnya pelayanan persalinan oleh Nakes 75 %;
- h. Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga medis dan para medis.

C. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata sampai ke kampung-kampung terpencil;
- b. Meningkatkan jangkauan pelayanan prasarana kesehatan perorangan;
- c. Mendukung tersedianya makanan dan gizi yang menjangkau masyarakat kampung;
- d. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit melalui sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 5.1.9. Membangun pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan khusus untuk menarik industri hulu sampai industri hilir yang dapat mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang bermutu dan bernilai jual yang tinggi.

A. Kondisi Umum

Provinsi Papua dengan sumber daya alam yang cukup melimpah memiliki arti yang sangat strategis bagi penduduk asli papua, apalagi bagi masyarakat peramu yang secara alami sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya hutan, kondisi politik pada waktu yang lalu kurang mendukung masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat sosial ekonomi dari eksploitasi hasil sumber daya alam yang dimilikinya.

Dengan kehadiran Undang-undang Otsus memberikan ruang kepada pihak pengelola sumber daya alam dan masyarakat setempat agar memanfaatkan sumber daya tersebut dengan prinsip pengelolaan lingkungan sumber daya hayati selalu lestari , kompensasi terhadap hak-hak ulayat masyarakat serta harus dapat memberikan kontribusi kepada daerah.

Sejumlah kendala serius yang masih dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Papua didalam penanganan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan adalah pemanfaatan hutan yang tidak taat hukum (illegal logging), belum optimalnya pengamanan dan pengelolaan sumber daya kelautan, migas, mineral, batubara serta belum adanya langkah-langkah pemulihan sumber daya alam, lingkungan, pencemaran dan akses informasi potensi sumber daya alam.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam diarahkan untuk menumbuhkan industri berskala kecil guna meningkatkan usaha ekonomi rakyat, (termasuk industri rumah tangga) dan industri berskala menengah dengan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai basis untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri disertai dengan pola pembinaan yang tepat. Dengan demikian mampu menarik industri hulu sampai industri hilir agar dapat mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang bermutu dan memiliki nilai jual tinggi, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta membantu pembukaan lapangan kerja baru.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah ;

- Terciptanya dan terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun guna menjawab permasalahan tersebut adalah ; Meningkatkan daya saing Papua sebagai tujuan utama investasi industri yang berbasis sumber daya alam mulai dari industri hulu sampai industri hilir.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran).

- 5.1.10. Mengembangkan Program-program di bidang kependudukan transmigrasi, ketenagakerjaan dan keluarga berencana dengan fokus utama membangun keluarga kecil yang sehat dan sejahtera.

A. Kondisi Umum

Sasaran utama pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin. Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut, maka perlu diadakan upaya pengendalian penduduk yang meliputi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Tujuan pengendalian penduduk adalah mewujudkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan kuantitas, kualitas dan penyebaran penduduk dalam rangka menciptakan kualitas keluarga sejahtera sebagai bagian dari upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan demikian, kebijakan perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai agar menjadi kekuatan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diselenggarakan untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya pembangunan keluarga sejahtera, termasuk keluarga berencana bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera tetap didasarkan pada kesadaran, rasa tanggung jawab, dan sukarela, dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta norma sosial dan kesusilaan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah ;

- a. Tertatanya sistem administrasi kependudukan;
- b. Terkendalinya migrasi penduduk ke Provinsi Papua;
- c. Tersedianya tenaga trampil dalam pengembangan sentra-sentra produksi;
- d. Meningkatnya ketrampilan keluarga untuk menambah sumber pendapatan
- e. Meningkatnya kualitas hidup keluarga.

C. Arah Kebijakan

Berbagai arah kebijakan yang disusun guna menjawab berbagai permasalahan diatas adalah :

- a) Menata sistem administrasi kependudukan;
- b) Mengendalikan migrasi penduduk ke Provinsi Papua;
- c) Menyediakan tenaga terampil dalam pengembangan sentra-sentra produksi;
- d) Mengembangkan ketrampilan keluarga dalam rangka menaikan sumber pendapatan;
- e) Mengembangkan keluarga berkualitas;

D. Matriks...../40

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran).

- 5.1.11. Mengembangkan Program-program yang menjaga, melindungi dan memelihara lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

A. Kondisi Umum

Pentingnya lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran dan kerusakan sumber alam hayati menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua dalam proses pembangunan ke depan. Kebijakan untuk menciptakan lingkungan hidup yang seimbang dan lestari mutlak diperlukan guna menjaga sumber daya alam sehingga tidak rusak dan terpelihara secara sistematis. Sehubungan dengan itu, maka perlu di susun kerangka regulasi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah

- a. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan
- b. Menurunnya tingkat pengrusakan lingkungan
- c. Melestarikan flora dan fauna yang dilindungi

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun dan ditempuh guna mencapai sasaran dimaksud adalah ;

- a) Mengendalikan dan mengawasi kasus pencemaran lingkungan.
- b) Mengendalikan dan mengawasi kasus pengrusakan lingkungan.
- c) Melindungi flora dan fauna sebagai kekayaan alam Papua

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran).

- 5.1.12. Bekerja sama dengan semua lembaga agama untuk membina dan memelihara suatu kehidupan rohani yang beriman, beribadah, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

A. Kondisi Umum

Pembangunan kehidupan beragama diarahkan pada peningkatan peran strategis lembaga-lembaga keagamaan dan pemuka-pemuka agama untuk dapat meningkatkan kualitas perilaku hidup beragama sesuai ajaran agamanya masing-masing. Selain itu terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis antar lembaga agama sehingga dapat menciptakan masyarakat Papua yang beriman, taat beribadah dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Sasaran

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah ;

Meningkatnya koordinasi dan hubungan kerjasama dengan lembaga keagamaan untuk membina dan memelihara suatu kehidupan rohani yang beriman, beribadah dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun guna mencapai sasaran dimaksud adalah:

Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan lembaga keagamaan untuk membina dan memelihara suatu kehidupan rohani yang beriman, beribadah dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran).

- 5.1.13. Mengembangkan program-program dalam rangka penguasaan dan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang tepat guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini merupakan faktor penentu bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mengatasi keterbatasan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia sehingga mampu memberikan berbagai peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Guna mendukung upaya peningkatan kualitas pembangunan di semua bidang dan sektor, dipandang perlu untuk mengembangkan kegiatan penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk menemukan obyektivitas permasalahan secara ilmiah dan terapan, juga sebagai bahan perumusan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan iptek ini adalah meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penguasaan dan optimalisasi penerapan teknologi tepat guna yang semakin bervariasi dan berkualitas untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang dan sektor.

B. Sasaran

Berdasarkan pada uraian masalah diatas, maka sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah;

Meningkatnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang tepat guna bagi masyarakat.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan IPTEK yaitu ;

Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK tepat guna bagi masyarakat.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

BAB VI

AGENDA MEMBANGUN TANAH PAPUA YANG
AMAN DAN DAMAI

- 6.1.1. Bekerja sama dengan pihak keamanan untuk membina masyarakat dalam menjaga keamanan secara swadaya dan swakarsa serta meningkatkan daya tangkal untuk menangkal setiap gangguan dan ancaman yang datang dari dalam dan dari luar.

A. Kondisi Umum

Upaya menciptakan rasa aman dan damai, memerlukan pengelolaan keamanan dan ketertiban secara terpadu. Pada dasarnya hal ini merupakan tanggung jawab bersama, maka dipandang perlu untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam menangkal berbagai gangguan dan ancaman. Meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, telah mengganggu kelancaran proses pembangunan dan sekaligus menjadi kendala serius bagi upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk menjadikan Tanah Papua sebagai Tanah damai, memerlukan strategi penanganannya yang memadai yang dijabarkan dalam sejumlah rumusan permasalahan, sasaran pencapaian, arah kebijakan, dan program prioritasnya sebagai berikut :

B. Sasaran...../42

B. *Sasaran*

Langkah-langkah kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertanggulangnya kejahatan transnasional, diarahkan pada upaya :

- a) Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan secara swadaya dan swakarsa;
- b) Membina kesadaran masyarakat secara persuasif dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan;
- c) Mengembangkan sistem koordinasi penanganan terpadu antar Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/ POLRI secara persuasif

C. *Arah Kebijakan*

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan;
2. Peningkatan upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
3. Peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan;
4. Penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. *Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).*

- 6.1.2. Bekerja sama dengan para penegak hukum untuk membina kesadaran hukum masyarakat untuk hidup tertib, teratur, disiplin dan taat kepada hukum.

A. *Kondisi Umum*

Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan daerah di Tanah Papua, diperlukan upaya penegakan hukum secara konsekwen dan konsisten sesuai aturan perundangan yang berlaku. Selain terus meng-upayakan implementasi aturan perundangan secara konsisten, dukungan masyarakat untuk menjalankan aturan perundangan tersebut sangat di-perlukan. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat kepada hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan sosial yang tertib, teratur dan berdisiplin. Selain dimensi positifnya, reformasi telah memberikan pengalaman indikatif yang bersifat negatif. Dalam banyak kasus, hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di masyarakat seringkali tidak lagi terpolakan dalam kerangka tertib hukum formal dan hukum adat. Terjadi banyak pelanggaran hukum yang tidak saja disebabkan oleh : *Pertama*, ketidaktahuan sebagian masyarakat. Dewasa ini terdapat banyak versi produk-produk hukum yang belum tersosialisasikan kepada masyarakat, karena versinya selalu berubah dan tak jarang saling bertentangan, inkonsistensi dan saling tumpang tindih satu sama lain; *Kedua*, ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap norma-norma hukum sebagai wujud dari kekecewaan atas produk-produk hukum yang isinya tidak konsisten. Kondisi tersebut telah berimplikasi pada timbulnya degradasi moral hukum, longgarnya disiplin, dan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Terkait dengan hal ini, peranan lembaga-lembaga peradilan yang sudah ada perlu ditingkatkan terus ke arah terciptanya sistem peradilan yang transparan dan terbuka, berkeadilan, tidak diskriminatif dan tegas.

B. *Sasaran*

Terhadap permasalahan di atas, upaya penanganannya diletakkan pada titik sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem hukum nasional;
- b) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat;
- c) Meningkatnya disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

C. Arah...../43

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran agar pemahaman dan kesadaran masyarakat serta disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap hukum nasional dan hukum adat dapat ditingkatkan, ditempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

- a) Menyebarluaskan informasi tentang hukum dan perundangan ke seluruh lapisan masyarakat secara aktif, dinamis dan berkesinambungan;
- b) Meningkatkan peran lembaga adat dalam menjalankan hukum adat secara tepat;
- c) Membina masyarakat dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap hukum.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 6.1.3. Membina masyarakat untuk hidup rukun dan damai penuh per-saudaraan di antara sesama anak bangsa, menghargai hak-hak azasi manusia, menghargai hak-hak khusus dari penduduk asli, menghargai hak-hak sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama, hak yang sama dan kewajiban yang sama. Memberikan tempat yang layak dan aman tanpa diskriminasi kepada saudara-saudara yang datang dari pulau-pulau lain, untuk hidup di tanah Papua.

A. Kondisi Umum

Terwujudnya suatu kondisi kehidupan masyarakat yang selaras dengan tatanan nilai kebersamaan. Masyarakat Papua, dikenal bersifat multi-kultural yang sangat kaya dengan nilai-nilai adat dan budaya, terdiri dari berbagai etnis yang datang dari berbagai pulau di Indonesia dengan corak kebudayaan dan adat-istiadatnya masing-masing. Tidak kurang dari 300an etnis asli dan non asli Papua, hidup dan eksis bersama-sama yang mencirikan kemajemukan, keanekaragaman, mengagungkan per-bedaan dan kesederajatan. Upaya berkesinambungan untuk mencapai tata kehidupan yang sederajat dan saling menghargai, memerlukan kearifan perlakuan.

Pengalaman menunjukkan betapa pahitnya sejarah masa lampau yang telah menampakkan ketimpangan perlakuan terhadap *endogeneous people*, di mana hak-hak khusus penduduk asli kurang dipedulikan, sehingga melahirkan ketimpangan kehidupan sosial yang sangat mencolok. Maraknya kasus pelanggaran HAM adalah cermin eksese-ekese yang terjadi akibat dari suatu kebijakan pembangunan yang hanya bersifat parsial, tidak menyeluruh, dan cenderung kuat bersifat eksklusif. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, melainkan harus ada perubahan orientasi pembangunan yang dapat menghantar-kan kepada suatu kondisi kehidupan sosial yang berkesetaraan. Oleh karena itu, pergeseran orientasi pembangunan menuju masa depan Papua baru, mengedepankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak khusus penduduk asli Papua dan mengeliminir kasus-kasus pelanggaran HAM, dengan tetap memberikan tempat yang layak bagi semua masyarakat di Tanah Papua.

B. Sasaran

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan di atas ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a) Terwujudnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua secara tuntas dan menyeluruh;
- b) Terwujudnya penghargaan terhadap hak-hak khusus penduduk asli yang tinggi;
- c) Terwujudnya tata hubungan antar masyarakat tanpa diskriminasi.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah kebijakan, seperti :

- a) Mendorong penyelarasan pandangan dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua secara tuntas dan menyeluruh untuk tercapainya kesepakatan antar para pihak dengan mengedepankan kearifan;
- b) Meletakkan hak-hak khusus penduduk asli Papua dalam kerangka pembangunan hukum secara menyeluruh sesuai Undang-undang No : 21/2001;
- c) Mendorong terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang setara didasari prinsip kesamaan, toleransi, dan saling menghargai.

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 6.1.4. Bekerja sama dengan semua instansi/lembaga terkait untuk membina para penegak hukum agar supaya bekerja secara profesional, jujur dan taat kepada hukum, menjadi teladan dan berwibawa.

A. Kondisi Umum

Kinerja para penegak hukum menjadi ajang taruhan bagi keberhasilan pembinaan hukum guna menunjang proses pembangunan. Oleh karena itu diperlukan upaya sinergis lintas institusi dalam rangka meningkatkan keterandalannya. Dalam menjawab kebutuhan penyediaan penegak hukum yang profesional, jujur, dan berwibawa, maka pening-katan kapasitas individualnya perlu ditingkatkan, yaitu kapasitas individual yang memiliki integritas moral tinggi dan memiliki wawasan dan kepedulian yang responsif, sehingga dapat diteladani oleh masyarakat. Dengan integritas penegak hukum yang tinggi dan kokoh, diharapkan dapat memberantas mafia peradilan yang akhir-akhir ini semakin marak saja.

B. Sasaran

Untuk meningkatkan kapaitas aparat penegak hukum, ditetapkan sasarannya adalah terwujudnya kapasitas aparat penegak hukum yang profesional, jujur, dan berwibawa.

C. Arah Kebijakan

Adapun langkah-langkah kebijakan ke arah terwujudnya aparat penegak hukum yang handal, ditempuh kebijakan mengembangkan kapasitas aparat penegak hukum yang profesional, jujur, dan berwibawa

D. Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran II).

- 6.1.5. Bekerja sama dengan semua instansi/lembaga terkait untuk sedini mungkin mencegah konflik sosial dan politik, baik konflik hori-sontal maupun konflik vertikal. Membangun kebersamaan untuk hidup rukun dan damai, menghargai perbedaan dan kemajemukan sebagai kekayaan dan keindahan bersama yang mempersatukan bangsa ini.

A. Kondisi Umum

Pada dasarnya konflik merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi demokrasi yang baik memerlukan manajemen konflik yang efektif. Konflik yang tidak dikelola dengan baik, justru akan merugikan kelang-sungan demokrasi.

Di Tanah Papua, terdapat beragam konflik yang dapat ditelusuri dari berbagai aspek dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, baik konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Penye-babnya juga beragam, mulai dari

masalah...../45

masalah pribadi, sosial-kemasyarakatan, ketimpangan layanan pembangunan yang melahirkan penyandang masalah sosial, hingga ke masalah politik.

Atas dasar semboyan yang dipegang teguh oleh semua komponen masyarakat untuk menjadikan Tanah Papua sebagai "Bumi Damai" sepanjang masa, maka konflik-konflik yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal perlu ditangani, dikelola, dan dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Papua guna dapat membangun kebersamaan untuk hidup rukun dan damai, menghargai perbedaan dan kemajemukan sebagai kekayaan dan keindahan bersama dalam satu nafas, menuju derajat kesejahteraan yang tinggi dan mandiri. Untuk itu, diperlukan kemampuan profesional dan independent. Oleh karena pengelolaan konflik dimaksudkan untuk mencegah pertikaian dan kekerasan serta menetralsir kelompok yang sedang bertikai, maka diperlukan keterampilan khusus secara profesional oleh aktor independent justru akan merugikan kepentingan semua pihak. dalam menyusun strategi penanganannya. Strategi yang dimulai dengan pemahaman atas hasil identifikasi faktor-faktor penyebab utama terjadinya konflik hingga diperolehnya solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

B. Sasaran

Sejumlah permasalahan di atas, diupayakan cara-cara penanganannya dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Terwujudnya penyelesaian konflik sosial kemasyarakatan secara damai berdasarkan prinsip kesetaraan
- b) Terwujudnya penyelesaian konflik politik
- c) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
- d) Pemberian penghargaan terhadap para pejuang Pepera dan pembebasan Irian Barat asal Papua.

C. Arah Kebijakan

Upaya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan tersebut melalui kebijakan yang diarahkan pada :

- a) Mengembangkan sistem koordinasi antar instansi terkait secara efektif dan efisien dalam rangka penanaman nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, senasib sepenanggungan;
- b) Mendorong peningkatan fungsi dan peran lembaga-lembaga politik dalam rangka penyelesaian konflik politik;
- c) Mendorong penuntasan masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan institusi dan partisipasi masyarakat;
- d) Meningkatkan perhatian terhadap para pejuang, veteran dan kepahlawanan.

Matriks Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009 (Lampiran).

BAB VII

AGENDA MENINGKATKAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR (INFRASTRUKTUR)

7.1. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Transportasi Darat

A. *Kondisi Umum*

Dimaksudkan dengan Transportasi Darat yaitu Jalan dan jembatan, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat seperti terminal penumpang antar kawasan, pagar pengaman jalan, lampu lalu lintas jalan, Rambu Lalu lintas, angkutan umum, dan penataan manajemen dalam pengelolaan Transportasi darat.

B. *Sasaran*

Secara keseluruhan dalam lima tahun kedepan sasaran pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang akan dicapai adalah terhubungnya Ibukota kabupaten dengan pusat pengembangan, yaitu pusat-pusat permukiman masyarakat, sentra-sentra produksi dan kawasan tumbuh cepat, seperti Mambramo, Lereh, Kawasan Selatan (Mimika, Yahukimo, Merauke), sehingga memudahkan akses masyarakat ke berbagai wilayah di Provinsi Papua dan mendorong masuknya investasi. Sasaran pokok pembangunan prasarana perhubungan darat yang akan dicapai adalah :

- a. Terbangunnya sistem jaringan jalan, terutama menghubungkan kawasan pegunungan tengah, serta pusat-pusat permukiman, sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan tumbuh cepat, seperti Lereh, Membramo, dan Pantai Selatan Papua dengan. kawasan pelabuhan dalam sistem transportasi terpadu.
- b. Terbangunnya Sarana dan prasarana perhubungan Darat lintas Wilayah.
- c. Tersedianya teknologi yang mampu mengatasi permasalahan topografis dan geografis yang dihadapi pada berbagai kawasan.
- d. Tersedianya pendanaan secara berkelanjutan secara tahun jamak (*multi years*).

C. *Arah Kebijakan*

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan sarana prasarana perhubungan darat sebagaimana dikemukakan diatas maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah dengan mengembangkan rencana induk Tataran Transportasi Provinsi Papua yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan pembangunan perhubungan darat di Provinsi Papua. Arah kebijakan pembangunan prasarana perhubungan darat adalah sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan Kabupaten untuk pengembangan jaringan jalan, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan darat terpadu yang mampu mendorong percepatan perkembangan pusat-pusat permukiman, sentra-sentra produksi dan kawasan tumbuh cepat seperti kawasan Taja Lereh, Kawasan Membramo, kawasan Pantai selatan.
- b. Bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan jaringan jalan.
- c. Mengembangkan obligasi daerah melalui rekapitulasi sumberdaya alam dan bekerjasama dengan para donor untuk pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan tahun jamak (*multi years*) .
- d. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk menetapkan prioritas pembangunan, pembiayaan dan penyelesaian masalah tanah dalam rangka pembangunan sarana prasarana perhubungan darat.

e. Mendorong...../47

- e. Mendorong dan berkerjasama dengan pihak swasta nasional dan internasional untuk ikut berperan aktif melakukan investasi dalam pembangunan sarana prasarana pendukung perhubungan darat di Provinsi Papua.

Perhubungan Laut

A. Kondisi Umum

Dari 20 kota dan kabupaten, 11 diantaranya berada di pesisir, sedangkan 9 kabupaten lainnya berada di pedalaman, tetapi Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Yahukimo dapat dijangkau melalui sungai.

Peran transportasi laut masih cukup signifikan karena sebagian besar kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan bahan-bahan bangunan diangkut dengan menggunakan kapal kemudian didistribusi ke daerah pedalaman melalui angkutan udara. Demikian pula sebaliknya dalam mengangkut berbagai produksi untuk diantar pulau-pulau atau diekspor.

Kondisi transportasi laut saat ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif belum memadai, tetapi sudah ada inisiatif dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk melakukan berbagai upaya perbaikan seperti penambahan armada angkutan laut serta sarana dan prasarana pelabuhan. Saat ini Pemerintah Provinsi Papua telah mengoperasikan 6 unit kapal perintis yang melayari kota-kota pelabuhan di pesisir pantai utara maupun pantai selatan Papua. Selain itu beberapa kabupaten juga telah mengoperasikan kapal penumpang, kapal barang dan kapal tanker. Pelayaran nasional dan swasta saat ini telah beroperasi di Provinsi Papua, dengan menyinggahi beberapa pelabuhan besar.

Terbatasnya sarana prasarana perhubungan laut mengakibatkan sebagian masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap terpencil dan terisolasi serta belum dapat menikmati pelayanan dengan baik. Dalam kaitan itu, diperlukan pengembangan jaringan transportasi laut dalam tataran transportasi provinsi Papua yang memungkinkan dapat tercipta suatu sistem pelayanan transportasi laut yang mampu menjangkau daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.

B. Sasaran

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam lima tahun kedepan beberapa sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Tersedianya sistem pendataan dan rencana induk pengembangan transportasi laut yang mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan perhubungan laut yang mampu melayani dan memperlancar arus angkutan penumpang, barang dan jasa.
- b. Tersedianya pelabuhan/dermaga sesuai dengan ukuran dan kebutuhan armada angkutan laut.
- c. Meningkatnya kapal melayani kebutuhan masyarakat.
- d. Tersedianya galangan untuk perawatan dan perbaikan kapal, sehingga dapat mengefisienkan biaya perawatan dan perbaikan dan juga memperluas kesempatan kerja.
- e. Tersedianya rambu-rambu lalu lintas pelayaran laut untuk memudahkan dan mendukung keselamatan pelayaran.

C. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan prasarana perhubungan laut sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem pendataan, perencanaan dan monitoring yang mampu mengantisipasi kebutuhan perkembangan pembangunan transportasi laut di Provinsi Papua;

b. Mendorong...../48

- b. Mendorong kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan sarana prasarana perhubungan laut dan pengembangan armada angkutan laut;
- c. Mengembangkan armada yang sesuai dengan kondisi perairan di Provinsi Papua;
- d. Mengembangkan galangan kapal berdasarkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal;
- e. Mengembangkan prasarana dan fasilitas perhubungan laut.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2008 (Lampiran).

Perhubungan Udara

A. Kondisi Umum

Saat ini peranan perhubungan udara di Provinsi Papua masih sangat dominan dalam mendukung berbagai aktivitas pembangunan, terutama pada kawasan pegunungan tengah Papua, merupakan satu-satunya alat angkut bagi arus penumpang, barang dan jasa. Sebagai informasi pada Tahun 2005 jumlah barang yang diangkut kurang lebih 40.000 ton dari Jayapura ke Wamena dengan total biaya angkutan Rp. 231 milyar.

Kondisi ini menyebabkan barang kebutuhan sembilan bahan pokok maupun bahan bangunan sangatlah mahal. Sebagai perbandingan pada Tahun 2006 harga semen di Wamena Rp. 380.000,- dan di Mulia Rp. 1.240.000,- sedang di pelabuhan Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo harga semen Rp. 90.000,- Hal ini mengakibatkan beratnya beban anggaran pembangunan pemerintah dan juga beban masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Keadaan seperti ini tentu saja akan menjadi kendala dalam percepatan pembangunan di Kawasan Pegunungan Tengah Papua. Sebagai perbandingan saat ini bahan bangunan seperti semen di Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo yang diangkut melalui sungai Brazza, satu sak Rp. 90.000,-.

Walaupun saat ini terdapat kurang lebih 250 buah lapangan terbang perintis milik pemerintah dan milik yayasan keagamaan serta milik swasta, masyarakat dapat didarati oleh pesawat-pesawat kecil, tetapi tidak selamanya dapat dijangkau dengan mudah karena kondisi cuaca sangatlah fluktuatif, fasilitas navigasi sangat sederhana bahkan di beberapa lapangan terbang tidak memiliki sama sekali sarana navigasi udara.

Ditinjau dari sisi penerbangan internasional secara geografis Provinsi Papua tertetak pada posisi yang sangat strategis untuk menghubungkan benua Australia dan Asia serta kawasan Pasifik. Posisi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal, mengingat Provinsi Papua memiliki potensi sumberdaya alam sangat besar, yang dapat memasok berbagai kebutuhan masyarakat dunia. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak perusahaan swasta asing yang beroperasi di Kawasan Papua dan sekitar untuk memanfaatkan sumberdaya hayati maupun sumberdaya tambang.

B. Sasaran

Dalam rangka meningkatkan peran perhubungan udara di Provinsi Papua, maka dalam lima tahun kedepan sasaran pokok yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penerbangan, terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan kelancaran arus penumpang.
- b. Terbukanya peluang usaha yang lebih luas bagi swasta untuk mengembangkan usahanya di sektor perhubungan udara dan sektor pembangunan lainnya di Provinsi Papua.
- c. Terbukanya jalur-jalur penerbangan internasional yang mampu meningkatkan pengembangan ekonomi secara global.

d. Terbangunnya...../49

- d. Terbangunnya depot bahan bakar untuk kebutuhan penerbangan pada beberapa lokasi yang strategis di Provinsi Papua untuk membuka peluang penerbangan secara lebih luas.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud maka arah kebijakan pengembangan perhubungan udara di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu mendukung peningkatan akses ke daerah terpencil;
- b. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi, mengembangkan pelayanan prima dan memberikan kemudahan untuk berinvestasi;
- c. Bekerjasama dengan pihak swasta nasional dan internasional dalam mengembangkan jalur-jalur penerbangan internasional;
- d. Mendorong pihak swasta untuk investasi pada penyediaan depot-depot bahan bakar.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2008 (Lampiran).

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

A. Kondisi Umum

Potensi sumberdaya sungai dan danau di Provinsi Papua sangatlah besar. Di kawasan pantai utara dan selatan terdapat beberapa sungai yang sangat panjang dan dapat dilayari hingga ke hulu. Beberapa sungai besar seperti Sungai Mamberamo dan Sungai Digul menjadi sarana transportasi penting. Saat ini sungai Brazza mulai memperlihatkan perannya dalam memasok berbagai kebutuhan pokok dan bahan bangunan di Kawasan Pegunungan Tengah melalui Logpon Dekai.

Dampak pemasokan barang melalui sungai Brazza sangat signifikan dalam menekan harga-harga barang di Dekai Yahukimo. Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa harga semen di Logpon Dekai dapat mencapai Rp. 90.000,- per zak, atau hanya 30% dari harga di Wamena. Hal yang sama juga terhadap untuk harga barang kebutuhan pokok lain. Hal ini tentu saja akan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga mengurangi beban pada anggaran pembangunan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan transportasi sungai juga akan membuka keterisolasian pemukiman masyarakat, karena umumnya pemukiman masyarakat tersebar di sepanjang sungai.

B. Sasaran

Untuk itu maka beberapa sasaran pokok yang akan dicapai dalam pembangunan transportasi sungai dan danau adalah :

- a. Tersedianya data dan informasi terhadap kondisi sungai-sungai di Provinsi Papua.
- b. Pembangunan pelabuhan sungai di Logpon, Boven Digul, Mappi, dan Asmat.
- c. Tersedianya kapal dengan spesifikasi yang sesuai dengan sungai-sungai di Provinsi Papua.
- d. Terbangunnya rambu-rambu lalu lintas di sungai serta pos-pos pemantauan dan pengawasan.

C. Arah Kebijakan

Dalam angka pencapaian sasaran seperti disebutkan diatas maka ditempuh beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan...../50

- a. Mengembangkan sistem pendataan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk mendapatkan data dan informasi secara terinci.
- b. Mengembangkan sistem informasi dan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi kondisi fluktuatif sungai di Papua.
- c. Pembangunan pelabuhan Sungai.
- d. Pengadaan Kapal dengan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi tipologi sungai-sungai di Provinsi Papua.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan serta mengaktifkan pos-pos pemantauan dan pengawasan pada sungai-sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2008 (Lampiran).

7.2. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana untuk menyediakan energi murah bagi seluruh masyarakat pengguna.

A. Kondisi Umum

Salah satu permasalahan mendasar pembangunan di Provinsi Papua adalah masih terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan energi murah kepada masyarakat. Apalagi saat ini boleh dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik masih mengandalkan tenaga diesel yang menggunakan bahan bakar minyak, yang semakin menipis persediaannya dan harga yang semakin meningkat.

Dilain pihak diketahui bahwa di Provinsi Papua cukup tersedia sumber-sumber pembangkit energi seperti tenaga air, angin dan matahari. Pengembangan sumber-sumber pembangkit seperti disebutkan masih sangat terbatas walaupun diketahui bahwa penggunaan sumber-sumber pembangkit tersebut dapat menghasilkan energi listrik murah.

B. Sasaran

Sehubungan dengan upaya-upaya untuk memberikan pelayanan terhadap penyediaan energi murah kepada masyarakat maka sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan adalah :

- a. Terlayannya lebih dari 50 % rumah tangga di Provinsi Papua akan kebutuhan energi listrik dengan menggunakan sumber pembangkit yang murah;
- b. Teridentifikasinya sumberdaya pembangkit listrik air, angin dan matahari yang layak pada berbagai kawasan permukiman di Provinsi Papua;
- c. Terbangunnya dan tersedianya sumber-sumber energi murah secara permanen hingga ke kampung-kampung.

C. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud maka strategi dan kebijakan pembangunan yang akan ditempuh adalah :

- a) Melakukan identifikasi dan pendataan mengenai jumlah keluarga dan penyebarannya;
- b) Meningkatkan penyediaan energi listrik dengan mengoptimalkan SDA yang tersedia secara lokal;
- c) Melakukan indentifikasi dan studi kelayakan pengembangan energi murah yang berasal dari berbagai sumber pembangkit dan sesuai dengan kondisi permukiman penduduk serta dengan biaya murah;
- d) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang teknologi pembangkit listrik yang digunakan agar dapat merawat dan memanfaatkannya secara berkelanjutan;
- e) Membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat melakukan investasi terhadap pembangunan pembangkit energi secara layak.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2008 (Lampiran).

7.3. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Prasarana Air Bersih

A. Kondisi Umum

Salah satu faktor penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih mengakibatkan berkembangnya penyakit-penyakit yang bersumber dari air (water related), seperti diare, mutaber dan penyakit kulit.

Walaupun Provinsi Papua merupakan salah provinsi yang memiliki hutan paling luas dengan sungai yang panjang tetapi ketersediaan air baku masih merupakan salah satu permasalahan serius. Pengelolaan kawasan yang tidak memperhatikan proses-proses ekologis telah mengakibatkan kerusakan tata air di daerah ini bahkan beberapa kawasan DAS (daerah aliran sungai) di Papua termasuk dalam kategori DAS kritis di Indonesia. Kondisi perlu diperbaiki karena akan mengancam ketersediaan air baku yang berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam rangka percepatan pengembangan, dan pemeliharaan prasarana air bersih adalah :

- a) Tersedianya sarana dan prasarana air bersih untuk kebutuhan rakyat dikampung-kampung, distrik dan kabupaten/kota sebesar 75 %;;
- b) Meningkatnya daya dukung daerah tangkapan air terhadap kebutuhan air baku.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan percepatan pengembangan, prasarana air bersih adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyediakan air bersih/air minum bagi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat di kampung-kampung;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih bagi daerah-daerah yang rawan air bersih;
- c. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih sampai ke distrik dan kampung-kampung;
- d. Mendukung Perlindungan sumber air baku untuk penyediaan air minum secara berkelanjutan.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2008 (Lampiran).

7.4. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana telekomunikasi

A. Kondisi Umum

Peran telekomunikasi saat ini telah sangat mengglobal, sehingga hampir tidak ada lagi batas-batas pemisah antar wilayah negara. Dengan perkembangan teknologi dan sarana telekomunikasi dewasa ini setiap orang dapat berhubungan kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan peralatan yang sangat praktis.

Dalam kaitannya dengan upaya-upaya pembangunan dewasa ini telekomunikasi juga mempunyai arti strategis karena tidak saja berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi wilayah, tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pendukung aspek politik dan pertahanan keamanan. Terkait dengan hal tersebut, maka Provinsi Papua dituntut untuk mampu memperkuat daya saing daerah diantaranya melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi untuk menjamin kelancaran arus informasi.

B. Sasaran...../52

B. Sasaran

Dalam lima tahun kedepan sasaran pembangunan telekomunikasi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Terjangkaunya secara merata layanan telekomunikasi diseluruh wilayah Provinsi Papua;
- Dapat digunakannya fungsi-fungsi telekomunikasi lainnya seperti facsimille, internet, radio komunitas hingga ke distrik dan kampung;
- Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan sistem dan teknologi telekomunikasi;
- Tersedianya sarana/peralatan telekomunikasi dalam jumlah yang memadai;
- Optimalnya penyebaran informasi pembangunan.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran pembangunan telekomunikasi sebagai dimaksud maka akan ditempuh kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi hingga menjangkau wilayah distrik dan kampung.
- b. Bekerjasama dengan pihak swasta/perusahaan telekomunikasi untuk mengembangkan sistem telekomunikasi sehingga dapat memanfaatkan fungsi-fungsi telekomunikasi secara murah dan dapat menjangkau seluruh ibukota distrik.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu melayani dan memelihara sistem telekomunikasi
- d. Meningkatkan pembangunan sarana/peralatan telekomunikasi
- e. Meningkatkan jumlah dan mutu informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2008 (Lampiran).

- 7.5. Mengembangkan perusahaan-perusahaan yang mampu mengelola prasarana dan sarana tersebut, sehingga dapat terpelihara dengan baik dan kebijakan pembebanan biaya kepada masyarakat yang serendah-rendahnya.

A. Kondisi Umum

Membangun Papua Baru juga mengandung makna bahwa semua hasil pembangunan fisik maupun non-fisik harus dapat dikelola dengan baik dan efisien, sehingga memberikan nilai tambah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran serta masyarakat khususnya dunia usaha dalam pembangunan perekonomian harus menjadi lokomotif dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Papua. Aktivitas dunia usaha dalam pembangunan Papua lima tahun kedepan juga ditujukan untuk mengangkat citra pengusaha orang asli Papua. Karena melalui pengembangan dunia usaha diharapkan akan muncul para praktisi pelaku pembangunan, dengan karakter dan jiwa kewirausahaan yang tinggi. Kondisi ini perlu didorong agar dimasa datang lahir para pengusaha orang asli Papua yang benar-benar dapat menjadi penggerak dan teladan sehingga dapat memberikan motivasi kepada generasi orang asli Papua di masa datang.

B. Sasaran

Tersedianya perusahaan-perusahaan lokal milik orang asli Papua yang mampu mengelola infrastruktur dasar, sehingga memberikan manfaat ganda kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat secara luas.

C. Arah Kebijakan

Mendirikan perusahaan-perusahaan lokal dan mengembangkan mitra kerja secara profesional guna mendorong alih teknologi serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara cepat, dengan sistem manajemen profesional untuk kemakmuran masyarakat Papua.

D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2007 (Lampiran).

BAB VIII

KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2009 merupakan penjabaran dari RPJM Provinsi Papua dan RPJM Nasional, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, masalah dan tantangan pembangunan tahun 2009, prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pendanaan indikatif.

RKPD Provinsi merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, RKPD kabupaten/kota serta pedoman penyusunan RAPBD Provinsi tahun 2009. Untuk itu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. SKPD Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten kota serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan yang terkait dengan RKPD Tahun 2008 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2008 dan sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dikukuhkan melalui nota kesepakatan antar pimpinan DPRD dan Gubernur Provinsi Papua;
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD maupun dari APBN/DAK, maka setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun 2008 berdasarkan PPAS RAPBD;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musrenbang untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan;
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan;
7. Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing kepala SKPD;
8. Pada akhir Tahun Anggaran 2008, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2006
9. Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode Tahun 2009.

Dengan adanya RKPD Provinsi Papua, prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi daerah serta arah kebijakan pembangunan yang memperhatikan status fungsi dan beban yang di emban oleh kabupaten/kota, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

RKPD Tahun 2008 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Langkah-langkah persiapan di mulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

**BAB IX
PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Papua tahun 2009 tergantung pada sikap mental, takad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat Papua pada umumnya.

Dalam hal ini seluruh penyelenggara pemerintahan dan dukungan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD tahun 2009 ini agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.K.H ROEMBIAK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Para Anggota Muspida Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
5. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.